

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023

**SEKRETARIAT
DJPB**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2024 dapat terselesaikan.

LKj Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif dengan menggunakan indikator kinerja sebagai alat ukurnya.

Kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan LKj ini, dengan harapan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang semakin meningkat, disamping dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai evaluasi kinerja untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Jakarta, Januari 2024

Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3. Tugas dan Fungsi.....	4
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	5
1.5. Kendala dan Permasalahan	9
1.6. Sistematika Penyajian Laporan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Budidaya Tahun 2020 - 2024	11
2.2. Sasaran Strategis	12
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023	12
2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	16
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2. Analisis Capaian Kinerja	19
SS-1. Tatakelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	19
IK-1. Indeks Perencanaan Bidang Perikanan Budidaya.....	19
IK-2. Nilai PM SAKIP Sekretariat DJPB	20
IK-3. Persentase Pelaku Usaha budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA	22
IK-4. Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi	24
IK-5. Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi	25

IK-6.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB.....	26
IK-7.	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya	28
IK-8.	Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB.....	33
IK-9.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya	33
IK-10.	Unit kerja Setditjen PB yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	35
IK-11.	Presentase Dokumen Kerja Sama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budidaya	37
IK-12.	Presentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya	39
IK-13.	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani.....	40
IK-14.	Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2022	41
IK-15.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen PB	43
IK-16.	Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB.....	44
IK-17.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PB.....	46
IK-18.	Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen PB	48
IK-19.	Persentase layanan perkantoran Setditjen PB	49
IK-20.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen PB	50
IK-21.	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen PB	52
IK-22.	Persentase Capaian Nilai PMPRB DJPB Area Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Dan Penguatan Pengawasan	54
IK-23.	Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP	56
3.3.	Akuntabilitas Keuangan.....	59
BAB IV PENUTUP		61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023.....	16
Tabel 2. Capaian Indeks Perencanaan Bidang Perikanan Budidaya	20
Tabel 3. Capaian Nilai PM SAKIP Sekretariat DJPB	21
Tabel 4. Capaian Persentase Pelaku Usaha budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA.....	23
Tabel 5. Capaian Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi	24
Tabel 6. Capaian Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi	26
Tabel 7. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB	27
Tabel 8. Capaian Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya	29
Tabel 9. Capaian Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB	34
Tabel 10. Capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya.....	35
Tabel 11. Capaian Unit kerja Setditjen PB yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	36
Tabel 12. Capaian Persentase Dokumen Kerja Sama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budidaya	38
Tabel 13. Capaian Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya.....	39
Tabel 14. Capaian Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani	41
Tabel 15. Capaian Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2022	42
Tabel 16. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen PB	44
Tabel 17. Capaian Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB .	45
Tabel 18. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PB	47
Tabel 19. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen PB.....	48
Tabel 20. Capaian Persentase Layanan perkantoran Setditjen PB.....	50
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen PB.....	51

Tabel 22. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Setditjen PB.....	53
Tabel 23. Capaian Persentase Capaian Nilai PMPRB DJPB Area Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Dan Penguatan Pengawasan	55
Tabel 24. Capaian Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keragaan SDM Setditjen Perikanan Budi Daya.....	5
Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Pangkat/Golongan	6
Gambar 3. Keragaan Pejabat Fungsional Tertentu	7
Gambar 4. Keragaan Pejabat Fungsional Umum	8
Gambar 5. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Jenjang Pendidikan	9
Gambar 6. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya 2020-2024	11
Gambar 7. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020-2024.....	12
Gambar 8. Perjanjian Kinerja Revisi II Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023	14
Gambar 9. Dashboard Capaian Kinerja Setditjen PB	15
Gambar 10. Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 pada Unit Pengolah Lingkup Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB KKP.....	49
Gambar 11. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi DJPB Tahun 2023 dengan Tema Pengentasan Kemiskinan	56
Gambar 12. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023.....	60
Gambar 13. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2022.....	60
Gambar 14. Nilai Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023	60

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKj Tahunan Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023 merupakan laporan capaian kinerja atas target yang telah dicapai selama Tahun 2023 dan juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban Setditjen Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun anggaran 2023. Mengacu pada Rancangan Teknokratis Rencana Strategis (Renstra) Perikanan Budidaya Tahun 2020- 2024 maupun Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023, maka LKj Tahunan Setditjen Perikanan Budi Daya ini memuat rencana kinerja beserta target yang ingin dicapai serta pengukuran pencapaian sasaran termasuk keberhasilan dan kendala pelaksanaan kegiatan di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya selama tahun 2023.

PK Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023 berisi 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana penjelasan berikut:

1. Sasaran Strategis (SK) 1: Tatakelola Pemerintahan yang Baik Lingkup, yaitu:

- 1) **IKSK.24** Indeks Perencanaan Bidang Perikanan Budidaya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 8 (Indeks), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 93,75%;
- 2) **IKSK.25** Nilai PM SAKIP Sekretariat DJPB, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 75 (Prosen), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 78,73%;
- 3) **IKSK.26** Persentase Pelaku Usaha budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Prosen), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 120% (prosentase maksimal pada kinerjaku);
- 4) **IKSK.27** Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 90 (Prosen), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 120% (prosentase maksimal pada kinerjaku);
- 5) **IKSK.28** Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 100 (Prosen), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 100%;
- 6) **IKSK.29** Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 81 (Indeks), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 111,31%;
- 7) **IKSK.30** Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 71 (Indeks), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 120% (prosentase maksimal pada kinerjaku);
- 8) **IKSK.31** Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 3 (Prosen), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 120% (prosentase maksimal pada kinerjaku);

- 9) **IKSK.32** Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 100 (Prosen), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 100%;
- 10) **IKSK.33** Unit kerja Setditjen PB yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 92 (Prosen), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 120% (prosentase maksimal pada kinerjaku);
- 11) **IKSK.34** Persentase Dokumen Kerangka Kerja yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budidaya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 90 (Prosen), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 111,11%;
- 12) **IKSK.35** Presentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 86 (Prosen), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 116,28%;
- 13) **IKSK.36** Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 65 (Prosen), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 100%;
- 14) **IKSK.37** Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2022, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 100 (Prosen), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 100%;
- 15) **IKSK.38** Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen PB, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 77,5 (Prosen), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 106,9%;
- 16) **IKSK.39** Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 77,5 (Prosen), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 120% (prosentase maksimal pada kinerjaku);
- 17) **IKSK.40** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PB, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 77,5 (Prosen), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 115,03%;
- 18) **IKSK.41** Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen PB, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 75 (Prosen), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 120% (prosentase maksimal pada kinerjaku);
- 19) **IKSK.42** Persentase layanan perkantoran Setditjen PB, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 75 (Prosen), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 120% (prosentase maksimal pada kinerjaku);
- 20) **IKSK.43** Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen PB, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 89 (Nilai), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 92,27%;
- 21) **IKSK.44** Nilai Kinerja Anggaran Setditjen PB, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 82 (Nilai), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 92,47%;

- 22) **IKSK.45** Persentase Capaian Nilai PMPRB DJPB Area Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sdm, Penguatan Akuntabilitas, Dan Penguatan Pengawasan, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 94 (Prosen), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 109,7%; dan
- 23) **IKSK.46** Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 76 (Nilai), dengan capaian pada bulan Desember 2023 sebesar 105,17%.

Perbaikan atas ketercapaian kinerja yang ditetapkan pada tahun berikutnya adalah sebagaimana berikut:

- 1) memperbaiki penyediaan dokumen perencanaan kinerja yang SMART, memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), serta memanfaatkan secara berkesinambungan;
- 2) mendorong peningkatan kualitas SDM yang melaksanakan dan mengimplementasikan SAKIP di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya;
- 3) melakukan pembinaan disiplin SDM Aparatur;
- 4) monitoring disiplin pegawai;
- 5) monitoring penginputan dan capaian realisasi SKP sesuai matrik peran hasil yang mengacu pada indikator kinerja Sesditjen Perikanan Budi Daya;
- 6) mendorong satker untuk melakukan (i) Ketaatan dalam penyediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dan (ii) Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap kegiatan pengadaan Barang/Jasa;
- 7) mendorong satker untuk (i) Memanfaatkan RKBMN dalam penyusunan RKA-K/L tahun berikutnya, (ii) Mendorong usulan penetapan status penggunaan (PSP) BMN satker untuk ditetapkan PSP nya oleh Kementerian Keuangan dan (iii) melakukan inventarisasi atas BMN yang akan dilakukan pengelolaannya seperti penghapusan, PSP, Pemanfaatan, Hibah yang usulannya ditujukan kepada Pengguna Barang atau Pengelola Barang, (iv) percepatan penghapusan BMN rusak berat pada satker Sekretariat DJPB, (v) Melakukan penyusunan dan penyampaian laporan BMN secara tepat waktu, dan (vi) menyelesaikan tindak lanjut temuan LHP terhadap BMN lingkup Sekretariat DJPB.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja yaitu: (i) untuk menyajikan pertanggungjawaban dan informasi mengenai rencana dan capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen Perikanan Budi Daya dan (ii) sebagai bahan evaluasi atas keberhasilan maupun kegagalan serta permasalahan yang terkait dengan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya sehingga dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah perbaikan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Setditjen Perikanan Budi Daya mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Setditjen Perikanan Budi Daya merupakan salah satu unit kerja Eselon II yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.

2. Tugas

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

3. Fungsi

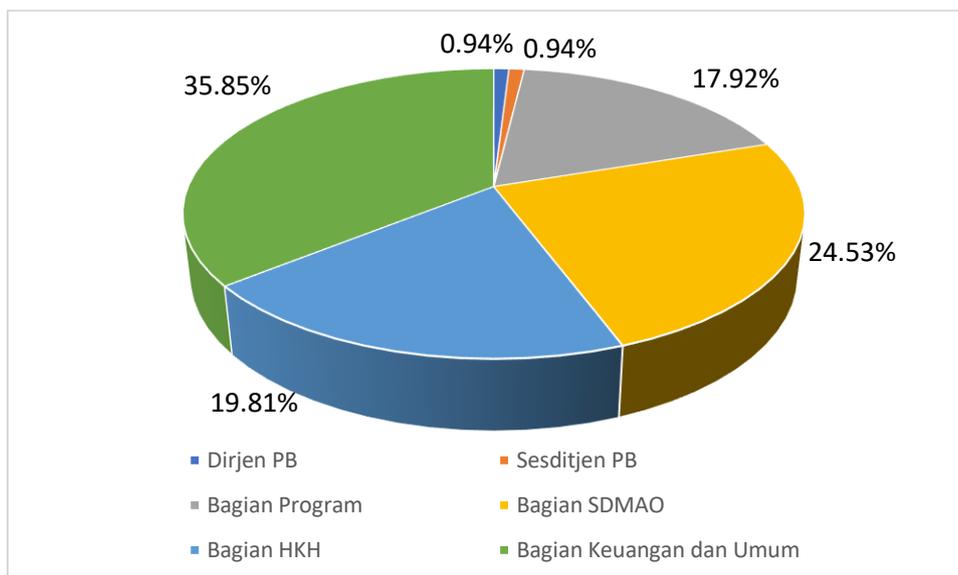
Setditjen Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

- 3) koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- 4) koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- 5) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

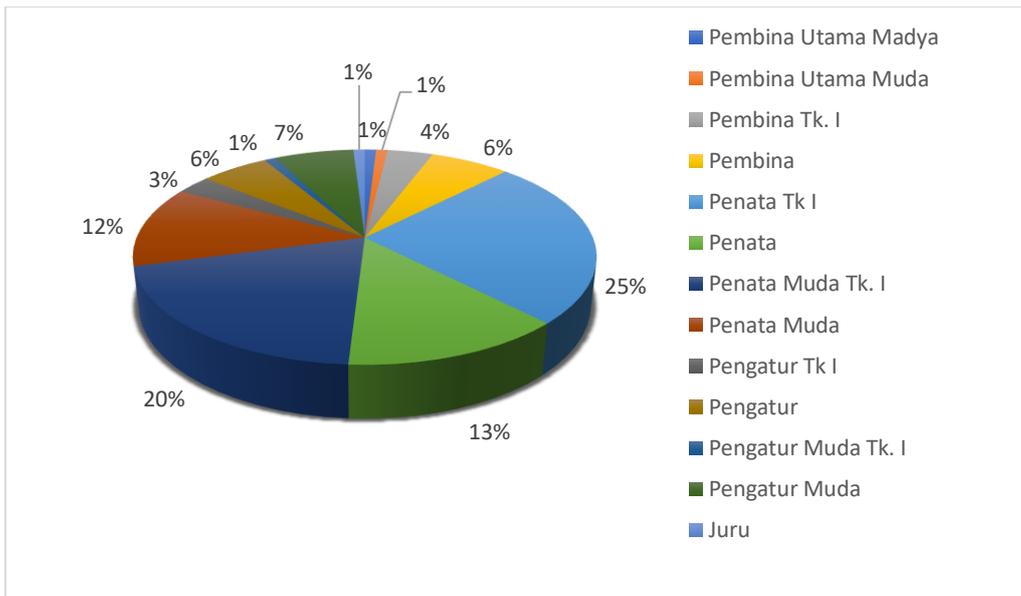
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai pada Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023 berjumlah 106 orang, terdiri dari Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya (Dirjen PB), Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Sesditjen PB) dan 104 orang pegawai tersebar pada 4 Kelompok Kerja lainnya, yaitu: (i) Kelompok Program berjumlah 19 orang; (ii) Kelompok SDMAO berjumlah 26 orang; (iii) Kelompok Hukum Kerjasama dan Hubungan Masyarakat berjumlah 21 orang; dan (iv) Kelompok Keuangan dan Umum berjumlah 38 orang.



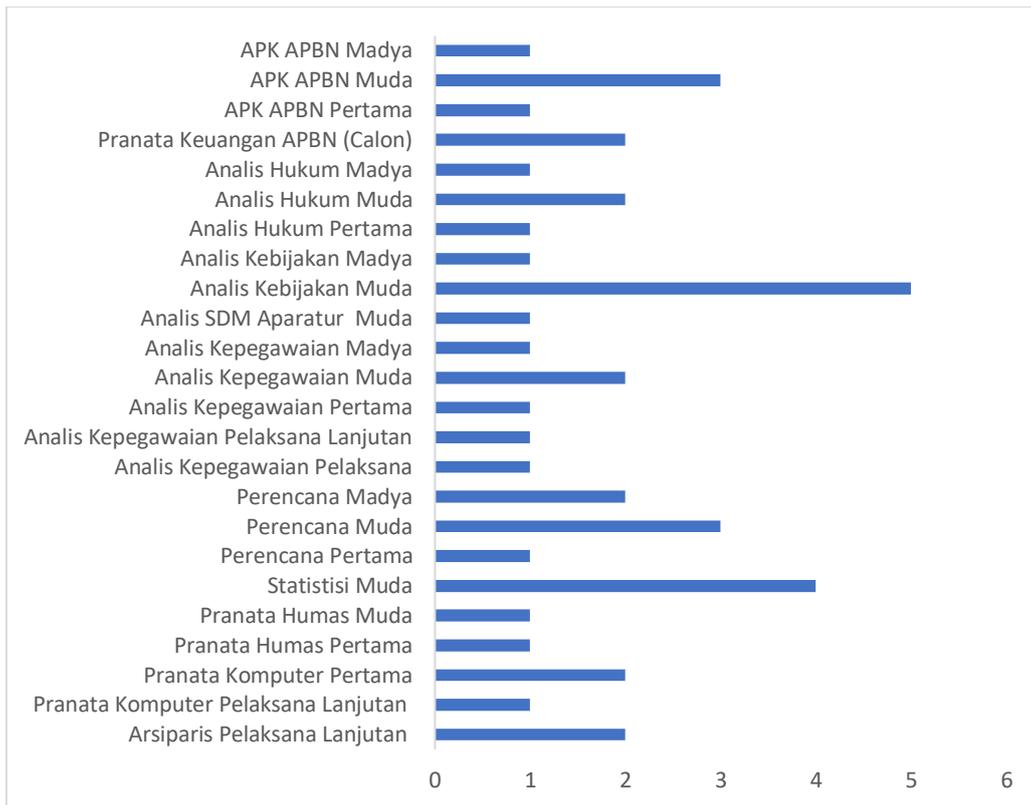
Gambar 1. Keragaan SDM Setditjen Perikanan Budi Daya

Berdasarkan pangkat/golongan ruang, pegawai pada Setditjen Perikanan Budi Daya terdiri dari: (i) Pembina Utama Madya setara Eselon I berjumlah 1 orang; (ii) Pembina Utama Muda setara Eselon II berjumlah 1 orang; (iii) Pembina Tk.1 berjumlah 4 orang; (iv) Pembina berjumlah 7 orang; (v) Penata Tk.1 berjumlah 27 orang; (vi) Penata berjumlah 14 orang; (vii) Penata Muda Tk.1 berjumlah 13 orang; (viii) Penata Muda berjumlah 13 orang; (ix) Pengatur Tk.1 berjumlah 3 orang; (x) Pengatur berjumlah 6 orang; (xi) Pengatur Muda Tk.1 berjumlah 1 orang; (xii) Pengatur Muda berjumlah 7 orang; dan (xiii) Juru berjumlah 1 orang.



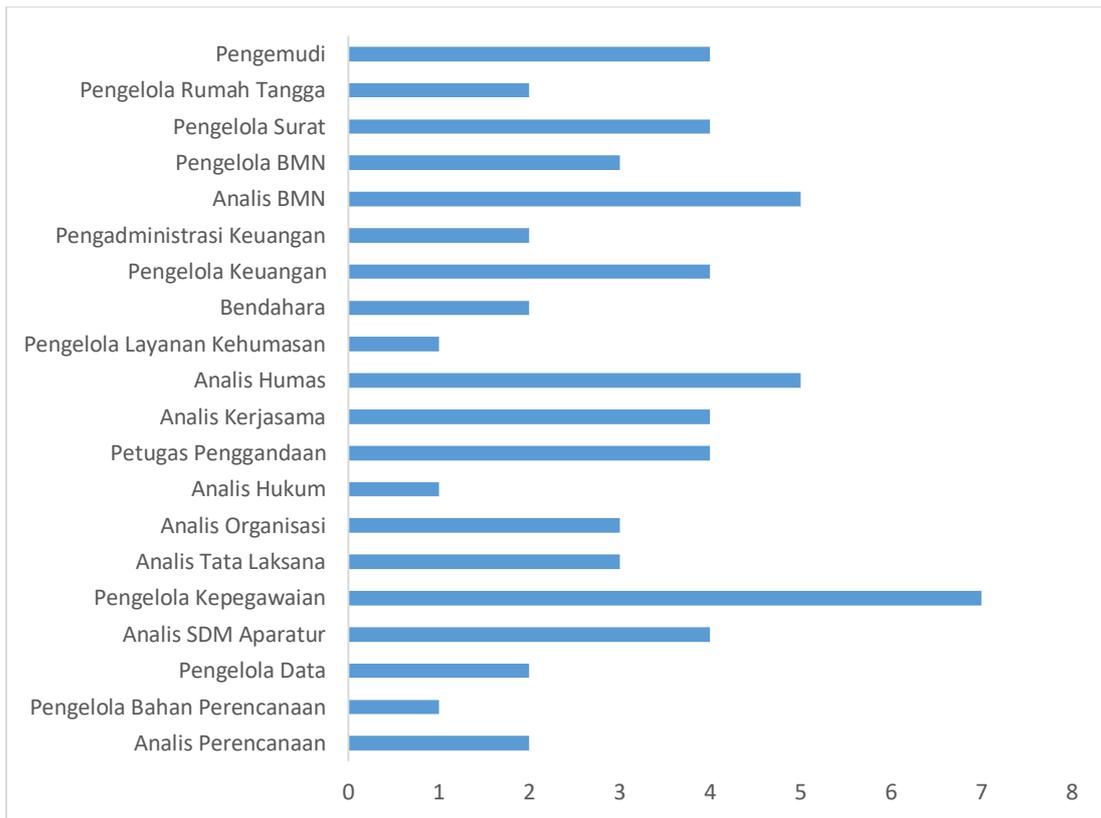
Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Pangkat/Golongan

Sedangkan pejabat fungsional tertentu pada Setditjen Perikanan Budi Daya berjumlah 41 orang yang terdiri dari Arsiparis Pelaksana Lanjutan, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, Pranata Komputer Pertama, Pranata Humas Pertama, Pranata Humas Muda, Statistisi Muda, Perencana Pertama, Perencana Muda, Perencana Madya, Analis Kepegawaian Pelaksana, Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan, Analis Kepegawaian Pertama, Analis Kepegawaian Muda, Analis Kepegawaian Madya, Analis SDM Aparatur, Analis Kebijakan Muda, Analis Kebijakan Madya, Analis Hukum Muda, Analis Hukum Madya, Pranata Keuangan APBN (calon), APK APBN Pertama, APK APBN Muda, dan APK APBN Madya.



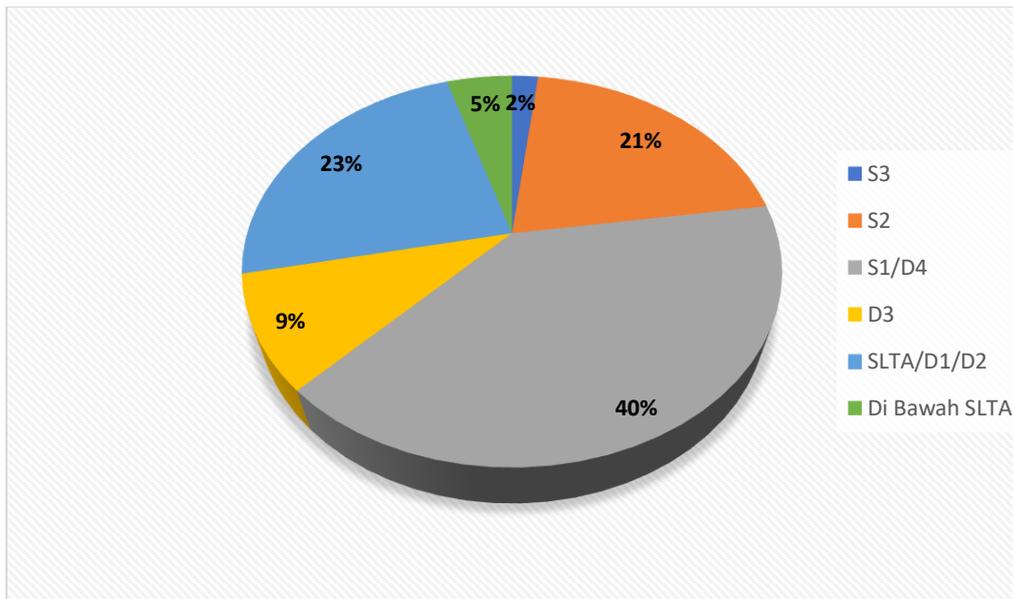
Gambar 3. Keragaan Pejabat Fungsional Tertentu

Pejabat Fungsional Umum pada Setditjen Perikanan Budi Daya berjumlah 63 orang, terdiri dari Pengemudi, Pengelola Rumah Tangga, Pengelola Surat, Pengelola BMN, Analisis BMN, Pengadministrasi Keuangan, Pengelola Keuangan, Bendahara, Pengelola Layanan Kehumasan, Analisis Humas, Analisis Kerjasama, Petugas Penggandaan, Analisis Hukum, Analisis Organisasi, Analisis Tata Laksana, Pengelola Kepegawaian, Analisis SDM Aparatur, Pengelola Data, Pengelola Bahan Perencanaan dan Analisis Perencanaan.



Gambar 4. Keragaan Pejabat Fungsional Umum

Sementara itu pengelompokan menurut jenjang pendidikannya, pegawai pada Setditjen Perikanan Budi Daya terdiri dari: (i) Lulusan S-3 berjumlah 2 orang; (ii) Lulusan S-2 berjumlah 22 orang; (iii) Lulusan S-1/D-4 berjumlah 42 orang; (iv) Lulusan D-3 berjumlah 10 orang; (v) Lulusan D-2/D-1/SLTA berjumlah 25 orang; dan (vi) Lulusan di bawah SLTA sebanyak 5 orang.



Gambar 5. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Jenjang Pendidikan

1.5. Kendala dan Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Dalam hal sumber daya manusia di lingkup perikanan budidaya, yang secara umum meliputi perubahan struktur organisasi yang dinamis, dan kreativitas sumberdaya manusia untuk pengembangan organisasi masih rendah.
2. Masih rendahnya sosialisasi dan/atau bimbingan kembali tentang pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

LKj Tahunan Setditjen Perikanan Budi Daya ini menyajikan capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2023, yang diketahui dari realisasi capaian target indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan, maka akan dapat diketahui permasalahan yang ada dan tindak lanjutnya demi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian LKj Tahunan Setditjen Perikanan Budi Daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Bab I, Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, keragaan SDM, dan sistematika penyajian laporan kinerja.
2. **Bab II, Perencanaan Kinerja**, menguraikan tentang Rencana Strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2020 – 2024 dan PK Setditjen Perikanan Budi Daya dan Pengukuran Capaian Kinerja.

3. **Bab III, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, menyajikan capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya untuk setiap SS sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk pencapaian tersebut.
4. **Bab IV, Penutup**, menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya serta perbaikan yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang ada guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.
5. **Lampiran**, menyajikan dokumen pendukung laporan kinerja yang diperlukan sebagai penjelasan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Budidaya Tahun 2020-2024

Berdasarkan Rancangan Teknokratis Renstra Perikanan Budidaya 2020-2024, Ditjen Perikanan Budidaya melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budidaya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budidaya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budidaya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 6. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya 2020-2024

Kebijakan pembangunan perikanan budidaya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi yang meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan. Kelompok strategi tersebut kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020-2024

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai suatu *outcome/ impact* dari program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2020-2024 adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya, Setditjen Perikanan Budi Daya telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu: (i) Penetapan SS dan IKK Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2023 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan pada Setditjen Perikanan Budi Daya selama satu tahun, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja; (ii) PK Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2023; dan (iii) Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi tahun 2023.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/satuan kerja. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk: (i) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (ii) Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya; (iii) Alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah; (iv) Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (v) Dasar pemberian penghargaan (*reward*)/sanksi (*punishment*).

Adapun Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2023 hasil revisi dapat dilihat pada Gambar 8. berikut ini, sedangkan Perjanjian Kinerja Awal, Revisi I dan Revisi II dapat dilihat pada lampiran I dan II.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gemi Triastutik**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan
Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu



Gemi Triastutik

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1. Indeks Perencanaan Bidang Perikanan Budi Daya (Indeks)	8
	2. Nilai PM SAKIP Setditjen PB (Persen)	75
	3. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang terintegrasi KUSUKA (Persen)	80
	4. Persentase Data Produksi Perikanan Budi Daya yang Tervalidasi (Persen)	80
	5. Persentase Data Realisasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) lahan Pembudidayaan Ikan yang terintegrasi (Persen)	100
	6. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budidaya (Indeks)	81
	7. Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	71
	8. Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB (Persen)	3
	9. Persentase Capaian Nilai PMPRB DJPB Area Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, dan Penguatan Pengawasan (Persen)	94
	10. Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP (Nilai)	76

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	11. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	100
	12. Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani (Persen)	65
	13. Unit Kerja Setditjen PB yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Persen)	92
	14. Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	90
	15. Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya (Persen)	≥86
	16. Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2022 (Persen)	100
	17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	77,5
	18. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	89
	19. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	77,5
	20. Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	82

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	77,5
	22. Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	75
	23. Persentase layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	75

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	98.390.816.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023		98.390.816.000

Jakarta, 06 November 2023

Jakarta, 06 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

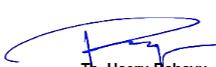
Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya


Tb. Haeru Rahayu


Gemi Triastutik

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya


Tb. Haeru Rahayu


Gemi Triastutik

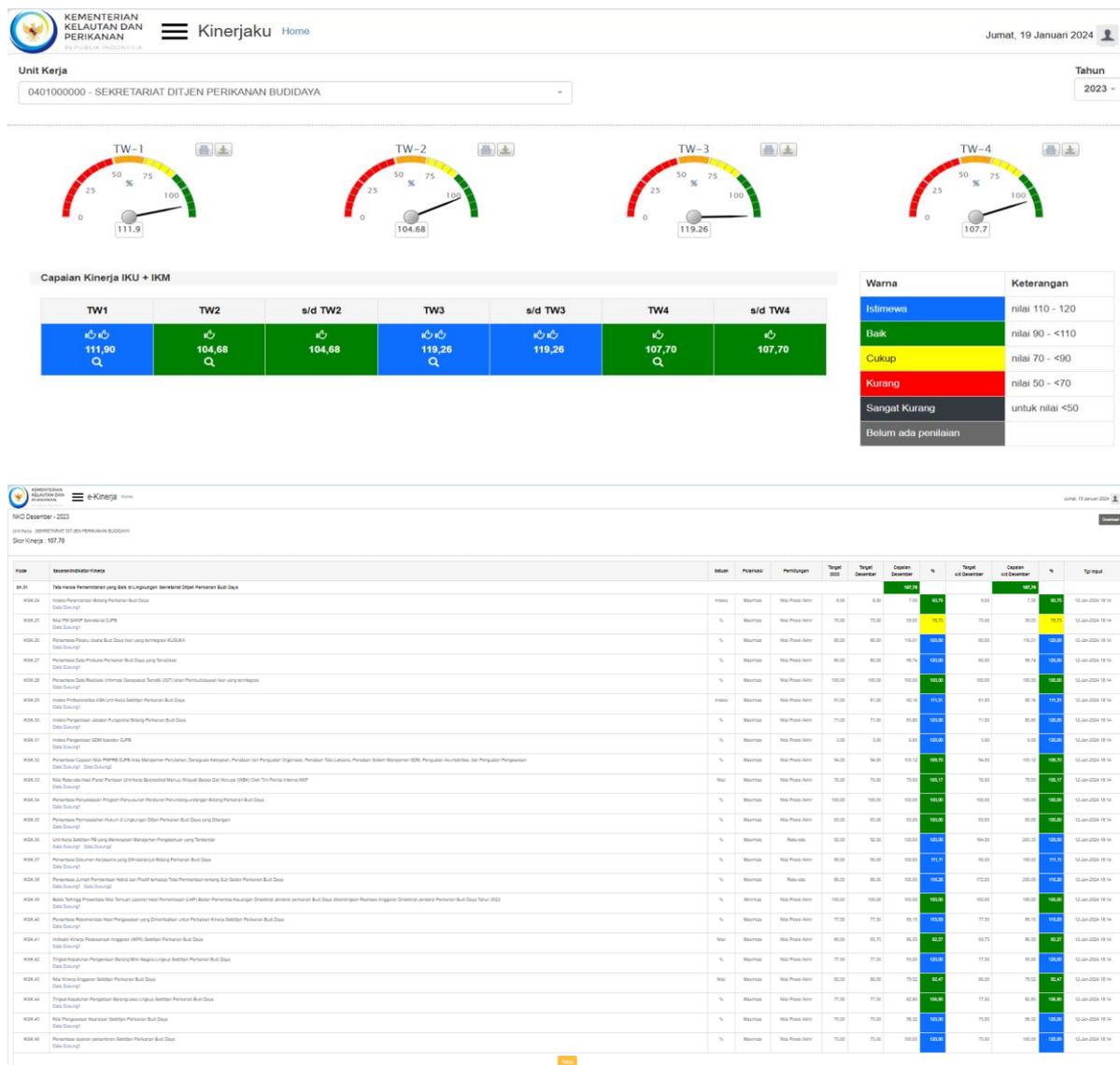
Gambar 8. Perjanjian Kinerja Revisi II Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada PK Setditjen Perikanan Budi Daya dengan data pencapaian kerjanya. Cara pengukuran mengacu pada manual indikator dan pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas.

Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh tim kinerja sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat. Pengukuran indikator kinerja yang baik adalah dapat memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data yang disajikan harus: (i) Valid, diukur menggunakan alat ukur yang tepat sesuai dengan manual indikator; (ii) *Reliable*, meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan (iii) Obyektif, bebas dari intervensi/kepentingan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala, didukung oleh implementasi dari aplikasi *Balanced Scorecard* (BSC) yaitu Kinerjaku, yang merupakan sistem aplikasi pengelolaan kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses melalui www.kinerjaku.kkp.go.id) ditunjukkan dengan warna : (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau (untuk indikator yang telah/melebihi target).



Gambar 9. Dashboard Capaian Kinerja Setditjen PB

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Capaian target kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2023 telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Keberhasilan capaian dapat terlihat pada nilai capaian IKU dan IK Setditjen PB dengan nilai NPSS sebesar 107,7 dengan didukung oleh anggaran sebesar Rp.432.909.168.000 dan telah terealisasi Rp.427.893.191.250 atau sebesar 98,84% (sumber data aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan). Terkait hal tersebut, maka segala upaya perbaikan akan terus dilakukan guna meningkatkan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023 dengan capaian kinerja yang dihasilkan sampai dengan tahun 2023.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi Kinerjaku, pengukuran capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2023	TARGET DESEMBER	CAPAIAN DESEMBER	(%)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Sekretariat DJPB	1	Indeks Perencanaan Bidang Perikanan Budidaya	8	8	7,5	93,75
		2	Nilai PM SAKIP Sekretariat DJPB	75	73	59,05	78,73
		3	Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA	80	80	116,01	120
		4	Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi	80	80	98,74	120

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	TARGET DESEMBER	CAPAIAN DESEMBER	(%)	
	5	Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi	100	100	100	
Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Sekretariat DJPB	6	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB	81	81	90,16	111,31
	7	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya	71	71	85,80	120
	8	Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB	3	3	6	120
	9	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya	100	100	100	100
	10	Unit kerja Setditjen PB yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	92	92	130	120
	11	Prosentasi Dokumen yang Ditindaklanjuti dalam Kerangka Kerja Sama Sub Sektor Perikanan Budidaya	90	90	100	111,11
	12	Presentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya	86	86	100	116,28
	13	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani	65	65	65	100
	14	Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil	100	100	100	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	TARGET DESEMBER	CAPAIAN DESEMBER	(%)	
	Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2022					
Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Sekretariat DJPB	15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen PB	77,5	77,5	82,85	106,90
	16	Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB	77,5	77,5	93,00	120
	17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PB	77,5	77,5	89,15	115,03
	18	Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen PB	75	75	98,32	120
	19	Persentase layanan perkantoran Setditjen PB	75	75	100	120
	20	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen PB	89	93,75	86,50	92,27
	21	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen PB	82	86	79,52	92,47
	22	Persentase Capaian Nilai PMPRB DJPB Area Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sdm, Penguatan Akuntabilitas, Dan Penguatan Pengawasan	94	94	103,12	109,70
	23	Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas	76	76	79,93	105,17

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	TARGET DESEMBER	CAPAIAN DESEMBER	(%)
	Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP				

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Mengukur kinerja tidak hanya dengan melakukan *entry* data capaian, namun juga analisis terhadap pencapaian kinerjanya, karena dengan melakukan analisis kinerja, informasi mengenai kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat diketahui dan bermanfaat untuk ketepatan penyusunan strategi peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Pengukuran capaian kinerja pada masing-masing IK sebagai berikut:

SS-1. Tatakelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu sistem atau cara pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang: administrasi, ekonomi hingga politik untuk mengatur segala permasalahan sosial negara. Sejatinya, tata kelola pemerintahan tersebut senantiasa memiliki orientasi terhadap suatu hal yang hendak dituju, yaitu untuk mencapai pemerintahan yang ideal.

IK-1. Indeks Perencanaan Bidang Perikanan Budidaya

Indeks perencanaan adalah indeks yang dibangun untuk mengukur kinerja penyusunan perencanaan bidang perikanan budidaya. Angka indeks merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain, baik pada waktu atau tempat yang sama atau berlainan.

Indeks perencanaan diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek:

- 1) **Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Perikanan Budidaya**, yaitu Keselarasan indikator kinerja jangka menengah DJPB (Level 1) dengan RPJMN, Keselarasan/kesesuaian Program DJPB dengan Program Prioritas Nasional, Keselarasan/kesesuaian Sasaran dan indikator sasaran program pada Renja DJPB dengan Renstra DJPB.
- 2) **Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perikanan Budidaya**, yaitu memadupadankan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan Perikanan Budidaya yang dimulai dari tahapan teknokratik melalui penyusunan prakiraan maju (*forward estimate*) sebagai angka dasar (baseline), Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), dan terakhir melalui tahapan politik pembahasan RAPBN di DPR. Hasil akhir berupa rancangan rencana kerja (Renja) yang diinput melalui aplikasi KRISNA Renja, yang kemudian dijabarkan ke dalam detail akun dan belanja di dalam aplikasi RKAKL SAKTI.

- 3) **Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah**, yaitu Keterpaduan kegiatan prioritas antara KKP dengan daerah yang ditunjukkan dengan keselarasan nomenklatur program dan kegiatan.

Tahapan yang akan diselenggarakan yaitu tahapan administratif hasil akhir di Aplikasi KRISNA Renja dengan RKAKL Sakti. Selain itu, tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama membandingkan rencana awal (usulan) dengan Rencana Kegiatan (RK) final yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah, akan diukur keselarasannya pula.

Indeks perencanaan Bidang Perikanan Budidaya ini bertujuan untuk mengukur keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan nasional bidang Perikanan Budidaya, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 8 (indeks) dengan capaian selama tahun 2023 sebesar 93,75% dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indicator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 98,71% dari anggaran sebesar Rp.5.936.071.000.

Tabel 2. Capaian Indeks Perencanaan Bidang Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Indeks Perencanaan Bidang Perikanan Budidaya					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022 -2023	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	8	7,5	93,75	-	8	93,75

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB									
Indikator Kinerja	Indeks Perencanaan Bidang Perikanan Budidaya									
Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	8	7,5	93,75	8	93,75

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu melakukan koordinasi terkait perubahan anggaran dan indikator kegiatan baik dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Kendala yang dihadapi yaitu perubahan anggaran yang berdampak pada perubahan target indikator kegiatan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu mengawal revisi DIPA dan indikator kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya.

IK-2. Nilai PM SAKIP Sekretariat DJPB

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP).

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Setditjen PB merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di DJPB. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Setditjen PB dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).

Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Setditjen PB berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB atas implementasi SAKIP di DJPB dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) yang sudah dirumuskan oleh KEMENPAN-RB.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 75 (prosen) dengan capaian tahun 2023 sebesar 78,73%, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan capaian tahun 2023 yakni sebesar 97,8% dari anggaran sebesar Rp.4.033.006.000.

Tabel 3. Capaian Nilai PM SAKIP Sekretariat DJPB

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Nilai PM SAKIP Sekretariat DJPB					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022-2023	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	75	59,05	78,73	-	75	78,73

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB								
Indikator Kinerja		Nilai PM SAKIP Sekretariat DJPB								
Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	75	59,05	78,73	75	78,73

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu melakukan penyusunan dokumen pendukung mengacu pada dokumen SAKIP (PK, rencana aksi, evaluasi rencana aksi, aplikasi Kinerja, LKj), melakukan verifikasi capaian pada aplikasi kinerja KKP dan menyusun pedoman evaluasi SAKIP lingkup DJPB.

Kendala yang dihadapi yaitu tata cara penilaian mandiri SAKIP menggunakan perhitungan yang berbeda mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu memperbaiki:

1. Penyediaan dokumen perencanaan kinerja yang SMART, memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), serta memanfaatkan secara berkesinambungan;
2. Pengukuran kinerja yang efektif dan efisien dengan pemberian *reward and punishment* dengan mengacu pada peraturan per-UU yang berlaku;
3. Menggambarkan gambaran dampak strategi/kebijakan dalam pencapaian kinerja pada pelaporan kinerja;
4. Peningkatan kualitas SDM yang melaksanakan dan mengimplementasikan SAKIP di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya.

IK-3. Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Pemerintah dan pendataan kepada pelaku usaha agar tepat sasaran, maka KKP melakukan identifikasi terhadap para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dengan diterbitkannya Kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan).

Kartu KUSUKA berfungsi sebagai Identitas profesi Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan, dan pembinaan kepada Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; dan sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian.

Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/*updating* data pelaku usaha budidaya ikan.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (prosen) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 120% (capaian maksimal pada aplikasi kinerja)

dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Data dan Informasi dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 99,55% dari anggaran sebesar Rp.3.681.297.000.

Tabel 4. Capaian Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022-2023	Renstra DJPB 2020-2024	
	Realisasi	Target				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	80	116,01	120	-	80	120

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB									
Indikator Kinerja	Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA									
Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	80	116,01	120	80	120

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mensosialisasikan SOP dalam *entry* data KUSUKA melalui aplikasi satudata kepada enumerator DJPB terutama enumerator yang masih baru dan baru ditugaskan sebagai enumerator;
2. Berkoordinasi dengan validator dinas kabupaten kota agar segera melakukan validasi data terutama data KUSUKA blok khusus;
3. Berkoordinasi dengan Pusluh dan Penyuluh yang ditugaskan sebagai enumerator perikanan Budi Daya untuk melakukan percepatan *entry* data KUSUKA;
4. Berusaha untuk melakukan pembayaran BOP pengumpulan data KUSUKA secara tepat waktu.

Kendala yang dihadapi yaitu:

1. *Coverage* lokasi pengumpulan data KUSUKA yang cukup luas;
2. Kondisi jaringan internet yang tidak merata di setiap daerah;

3. Tingkat pemahaman enumerator yang tidak sama;
4. Rasio antara enumerator dan jumlah responden yang belum memadai.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Pusdatin agar segera menyediakan aplikasi yang tidak tergantung pada ketersediaan jaringan sehingga entry data bisa dilakukan dari mana saja;
2. Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mempercepat proses pembayaran honor enumerator.

IK-4. Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi

Data produksi adalah catatan atas kumpulan fakta mengenai suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda. Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/Budidaya.

Budidaya perikanan didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik secara terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan (profit). Definisi Budidaya perikanan lainnya adalah campur tangan (upaya-upaya) manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan. Validasi adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu.

Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang tervalidasi, merupakan penilaian atas capaian realisasi pendataan produksi sampling tervalidasi yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target sampling serta capaian atas validasi nasional pada aplikasi dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (prosen) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 120% (capaian maksimal pada aplikasi kinerjaku), sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Data dan Informasi dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 99,55% dari anggaran sebesar Rp.3.681.297.000.

Tabel 5. Capaian Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022-2023	Renstra DJPB 2020-2024	
	Realisasi	Target				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	80	98,74	120	-	80	120

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB								
Indikator Kinerja		Persentase Data Produksi Perikanan Budiaya yang Tervalidasi								
Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	80	98,74	120	80	120

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mensosialisasikan SOP dalam *entry* data KUSUKA melalui aplikasi satudata kepada enumerator DJPB terutama enumerator yang masih baru dan baru ditugaskan sebagai enumerator;
2. Berkoordinasi dengan validator dinas kabupaten kota agar segera melakukan validasi data terutama data KUSUKA blok khusus;
3. Berkoordinasi dengan Pusluh dan Penyuluh yang ditugaskan sebagai enumerator perikanan Budi Daya untuk melakukan percepatan *entry* data KUSUKA;
4. Berusaha untuk melakukan pembayaran BOP pengumpulan data KUSUKA secara tepat waktu.

Kendala yang dihadapi yaitu:

1. *Coverage* lokasi pengumpulan data KUSUKA yang cukup luas;
2. Kondisi jaringan internet yang tidak merata di setiap daerah;
3. Tingkat pemahaman enumerator yang tidak sama;
4. Rasio antara enumerator dan jumlah responden yang belum memadai.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Pusdatin agar segera menyediakan aplikasi yang tidak tergantung pada ketersediaan jaringan sehingga *entry* data bisa dilakukan dari mana saja;
2. Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mempercepat proses pembayaran honor enumerator.

IK-5. Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi

Geospasial dan Informasinya diatur dengan UU 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Informasi Geospasial (IG) adalah Data Geospasial (DG) yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.

Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar (IGD).

Persentase Realisasi Data IGT lahan pembudidayaan ikan yang Terintegrasi, merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data IGT lahan pembudidayaan

ikan yang telah dilakukan oleh unit data eselon 1 sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (prosen) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Data dan Informasi dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 99,55% dari anggaran sebesar Rp.3.681.297.000.

Tabel 6. Capaian Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022-2023	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	100	100	100	-	100	100

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB									
Indikator Kinerja	Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi									
Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100

Untuk mendukung pencapaian Indikator ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 yaitu:

1. Koordinasi dengan Pusdatin untuk mendapatkan citra satelit baru yang sesuai dengan persyaratan dalam penyajian IGT dalam satu peta KKP;
2. Koordinasi dengan BIG selaku Pembina data IGT secara nasional untuk memvalidasi data IGT lahan pembudidaya ikan agar dapat ditampilkan dalam satu portal peta KKP dan memenuhi persyaratan dari Kantor Staf Presiden.

Kendala yang dihadapi yaitu penyerahan citra satelit dari LAPAN membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga pekerjaan baru bisa dimulai pada pertengahan tahun.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu mengirimkan surat permohonan citra satelit di awal tahun.

IK-6. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks

Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- 1) Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.
- 2) Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir.
- 3) Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi :
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
 - b. Perilaku kerja.
- 4) Disiplin, diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi :
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 81 (indeks) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 111,31% dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Manajemen SDM dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 99,55% dari anggaran sebesar Rp.3.413.502.000.

Tabel 7. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022-2023	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra

84,41	81	90,16	111,31	5,8	81	111,31
-------	----	-------	--------	-----	----	--------

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB								
Indikator Kinerja		Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB								
Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
		60,61	57,48	85,80	84,41	81	90,16	111,31	81	111,31

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu:

1. Dimensi kualifikasi, belum ada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pencantuman Gelar Pendidikan.
2. Dimensi kompetensi, telah dilaksanakan pengembangan kompetensi melalui Diklat dan Seminar/*Workshorp*/sejenis, dengan rincian peserta Diklat mencapai 345 orang.
3. Dimensi Kinerja, sedang dilaksanakan penilaian kinerja PNS periode final pada Bulan Januari 2024.

Kendala yang dihadapi yaitu:

1. Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 418/SJ.3/KP.520/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 hal Pelaksanaan Penyesuaian Pendidikan dan Pencantuman Gelar bagi PNS yang memiliki pendidikan lebih tinggi, sehingga terdapat usul pencantuman gelar pendidikan yang dikembalikan karena dianggap tidak memenuhi kriteria. Kegiatan tersebut merupakan elemen pendukung dari dimensi kualifikasi atau merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan mutasi.
2. Pelaporan pelaksanaan telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, *workshop*, dan seminar belum berjalan maksimal. Kegiatan tersebut merupakan elemen pendukung dari dimensi kompetensi atau merupakan bagian dari kegiatan kebutuhan kompetensi ASN;
3. Masih terdapat kendala teknis pada aplikasi sehingga belum dapat dilakukan monitoring kepatuhan pengisian SKP (baik penyusunan maupun pelaksanaan kinerja). Kegiatan tersebut merupakan elemen pendukung dari dimensi kinerja atau merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan kinerja ASN;
4. Pelaporan penjatuhan hukuman disiplin ringan yang menjadi kewenangan unit kerja belum berjalan maksimal. Kegiatan tersebut merupakan elemen pendukung dari dimensi disiplin atau merupakan bagian dari kegiatan pembinaan kode etik dan disiplin ASN.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Melakukan inventarisasi pegawai yang telah selesai tugas belajar/izin belajar pada tahun 2023 PNS di Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya.
2. Melakukan inventarisasi kebutuhan pengembangan kompetensi melalui pengembangan pendidikan dan diklat.

- Melakukan penilaian SKP periode Triwulan dan periode final.

IK-7. Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya

Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya adalah upaya untuk mengelola, meningkatkan dan mengendalikan standar profesi Jabatan Fungsional di bidang Perikanan Budidaya, yang terdiri atas 4 (empat) jabatan fungsional, yaitu (1) Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Kategori Keahlian /Analisis Akuakultur, (2) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keahlian/ Pengelola Kesehatan Ikan, (3) Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Kategori Keterampilan/Teknisi Akuakultur, dan (4) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keterampilan/Teknisi Kesehatan Ikan, dengan lingkup pengelolaan yang meliputi pembinaan, pemberian rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional, penilaian kinerja, penyusunan pedoman, penata laksanaan administrasi jabatan fungsional, dan fasilitatif pengembangan karir jabatan fungsional bidang perikanan budi daya.

Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya dalam upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi Jabatan Fungsional berdasarkan Permen PAN RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS, Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Menduduki Jabatan Fungsional, Per BKN Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional, dan Keputusan Menteri KP Nomor 69 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 71 (indeks) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 120% (capaian maksimal pada aplikasi kinerja) dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Manajemen SDM dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 99,55% dari anggaran sebesar Rp3.413.502.000.

Tabel 8. Capaian Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022 - 2023	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	71	85,8	120	-	71	120

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB								
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya								
Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	71	85,80	120	71	120

Untuk mendukung pencapaian Indikator ini, beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yaitu:

Rekapitulasi Capaian Indeks Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2023

NO	KOMPONEN	TARGET	NILAI
1.	Penilaian hasil kerja pejabat fungsional bidang perikanan budi daya	20	20
2.	Persentase penetapan rekomendasi pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	20	20
3.	Pedoman jabatan fungsional yang di tetapkan	10	10
4.	Persentase capaian target angka kredit pejabat fungsional bidang perikanan budi daya di lingkup DJPB	30	24,69
5.	Rekomendasi penetapan kebutuhan jabatan fungsional bidang perikanan budi daya	20	11,11
	JUMLAH	100	85,81

Target Pengukuran Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya tahun 2023 adalah 71 dengan Kategori Optimal (71-90). Capaian Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2023 mencapai 85,8 dengan Kategori Optimal, dengan uraian sebagai berikut.

1. Penilaian hasil kerja pejabat fungsional bidang perikanan budidaya

Kegiatan PAK pejabat fungsional bidang perikanan budidaya terdiri dari Jabatan Fungsional Pengawas Bidang Pembudidayaan Ikan, Analis Akukultur, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) bidang budidaya, Pengelola Kesehatan Ikan, dan Teknisi Kesehatan Ikan dengan target indek penilaian 20 point.

Pelaksanaan penilaian PAK JF tersebut dilaksanakan masing-masing dua periode penilaian seiring akan diberlakukan PermenPAN RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, maka untuk penilaian kinerja jabatan fungsional hasil kerja tahun 2022 kebawah masih memungkinkan dilakukan penilaian dengan beredoman pada PermenPAN RB No. 13 tahun 2019.

Pelaksanaan penilaian kinerja pejabat fungsional Pengawas Bidang Pembudidayaan Ikan periode I Tahun 2023, sesuai Surat Perintah Tugas Sesditjen. Perikanan Budi Daya Nomor: B.1718/DJPB.1/KP.440/III/2023, dilaksanakan pada tanggal 28-31 Meret 2023, di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang, Jawa Barat, sedangkan periode kedua pada tanggal 20 s.d. 23 Juni 2023 ke Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi – Jawa Barat.

Sementara itu untuk jabatan fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Polkeskan) periode I Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 19-22 Maret 2023 bertempat di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, dan Undangan Penilaian Nomor B.2043/DJPB.1/TU.330/III/2023, pada periode ini jumlah DUPAK yang diusulkan untuk dilakukan penilaian fungsional PHPI sebanyak 98 DUPAK, dan Polkeskan sebanyak 31 DUPAK, yang merupakan hasil kerja dan kinerja tugas jabatan fungsional yang bersangkutan yang tersebar pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan periode penilaian kedua dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 16 Juni 2023 ke Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi – Jawa Barat.

Dari target penilaian PAK jabatan fungsional sebanyak 4 kali penilaian, telah dilaksanakan 4 kali penilaian, maka telah berkontribusi pada target indeks 20 point telah terealisasi sebesar 100% atau capaian indeks 20 point.

2. Persentase penetapan rekomendasi pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional.
Dalam hal pengelolaan jabatan fungsional bidang perikanan budidaya terdapat proses usulan rekomendasi pengangkatan dan proses kenaikan jenjang jabatan fungsional budang perikanan budidaya tahun 2023, dalam hal ini telah dilakukan proses usulan pengangkatan dalam jabatan serta proses kenaikan jenjang jabatan dari satuan kerja unit pengusul terdiri dari satuan kerja pusat, Unit Pelaksana Teknis, dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 40 orang, dari usulan tersebut telah seluruhnya dilakukan prosesnya 40 orang, dengan demikian presentasi mencapai 100% dari target capaian, atas setara dengan target indeks 20 point.
3. Pedoman jabatan fungsional yang di tetapkan
Dalam rangka pengelolaan jabatan fungsional bidang perikanan budidaya yang terdiri dari Jabatan Fungsional Analis Akukultur, Teknisi Akukultur, Pengelola Kesehatan Ikan, dan Teknisi Kesehatan Ikan maka pada tahun 2023 yang keseluruhan jabatan fungsional tersebut merupakan jabatan fungsional yang bersifat terbuka, sehingga memungkinkan diampu pada satuan kerja pusat (Sekretariat dan Direktorat Teknis), Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan satuan kerja Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota, telah ditetapkan standar kompetensi jabatan (SKJ) bidang perikanan budidaya sebagai berikut :
 - a. Kepmenpan-RB Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, dan Teknisi Kesehatan Ikan
 - b. Kepmenpan-RB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Analis Akukultur dan Teknisi Akukultur.Dengan terbitnya peraturan tersebut maka dari sisi kelengkapan pengelolaan jabatan fungsional bidang perikanan budi daya telah dapat dipedomani, baik dalam hal penyusunan materi soal-soal uji kompeteni, test masuk rekrutmen CPNS dan PPPK, maupun untuk pedoman penyusunan soal materi Diklat/pengembangan kompetensi pejabat fungsional.
Terkait dengan target penyusunan pendoman jabatan fungsional tahun 2023 ini maka telah dapat direalisasikan seluruhnya dengan capaian 100% atau setara dengan target indeks 20 point.
4. Persentase capaian target angka kredit pejabat fungsional bidang perikanan budidaya di lingkup DJPB

Dalam hal pengelolaan jabatan fungsional telah ditetapkan target penilaian angka kredit yang memenuhi target penilaian nilai. Dari sebanyak 604 pejabat fungsional bidang perikanan budidaya, terdapat 497 orang pejabat fungsional yang memperoleh nilai diatas target penilaian, jika dengan koefisien 30 maka didapat 24,68 point, atau setara dengan 82 %.

5. Rekomendasi penetapan kebutuhan jabatan fungsional bidang perikanan budidaya Sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Nomor B/528/M.SM.01.00/2018, tanggal 15 Oktober 2018, hal Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional, disebutkan bahwa dalam penyampaian usulan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi wajib didahului dengan penyampaian usulan kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk mendapatkan rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional, maka terkait dengan kewenangan penyetujuan rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional bidang perikanan budidaya yang berpedoman dengan pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional terdiri dari :
 - a. Permen KP Nomor 10 tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan
 - b. Permen KP Nomor 29 tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur
 - c. Permen KP Nomor 30 tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur
 - d. Permen KP Nomor 31 tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan

Terkait dengan kegiatan ini kami telah melakukan verifikasi, validasi usulan kebutuhan jabatan fungsional bidang perikanan budidaya yang diajukan oleh 27 Dinas Perikanan Kelautan Provinsi/Kabupaten/Kota, dari usulan tersebut telah diterbitkan rekomendasi sebanyak 15 satuan kerja pemerintah daerah dengan capaian 11,11 point dari target indeks 20 point.

Dalam pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional perikanan budidaya tahun 2023 terdapat kendala yang dihadapi antara lain :

1. Dengan terbitnya Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Kepala BKN No. 3 Tahun 2023 tentang tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan, maka metode penilaian PAK Jabatan Fungsional terjadi perubahan metode dan pola penilaian, yang dengan metode baru ini belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pemangku jabatan fungsional.

Dengan diterbitkan peraturan pembentukan jabatan fungsional akan dilakukan penyesuaian nomenklatur dari Jabatan Fungsional, sebagai berikut:

- Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan kategori keahlian, menjadi Jabatan Fungsional Analis Akuakultur;
- Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan kategori keterampilan, menjadi Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur;
- Pengendali Hama dan Penyakit Ikan kategori keahlian bidang budidaya ikan, menjadi Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan; serta
- Pengendali Hama dan Penyakit Ikan kategori keterampilan bidang budidaya ikan, menjadi Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan.

Proses perubahan nomenklatur jabatan didahului dengan penyusunan PAK Integrasi dari jabatan fungsional sebelumnya ke PAK hasil Integrasi jabatan fungsional yang akan ditempuh, terkait dengan hal ini untuk proses perubahan nomenklatur jabatan seluruh pejabat fungsional yang terdapat di Satuan Kerja Pusat dan UPT telah selesai, akan tetapi untuk pejabat fungsional yang terdapat di satuan kerja Pemerintah Daerah semuanya masih dalam proses penyusunan PAK hasil integrasi.

2. Proses penerbitan rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional yang diajukan oleh satuan kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota masih terkendala pemahaman metode perhitungan, dasar perhitungan, alat ukur, serta pemahaman umum kebutuhan jabatan serta peta jabatan pada satuan kerjanya, sehingga ketika kami verifikasi dan validasi usulannya terdapat kelengkapan yang belum sesuai.
3. Belum seluruhnya pejabat fungsional memahami aturan pengelolaan jabatan fungsional yang terbaru seperti terkait dengan Perka BKN No.3 Tahun 2023 yang merupakan turunan dari Permenpan-RB No.1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, hal ini terlihat dari banyaknya para pejabat fungsional bidang perikanan budidaya yang berada pada satuan kerja pemerintah daerah belum melakukan proses penilaian angka kreditnya.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu :

1. Dilakukan proses usul penetapan surat keputusan perubahan nomenklatur jabatan fungsional dari Pengawas Bidang Pembudidayaan Ikan ke Analis Akukultur dan Teknisi Akuakultur, dan pejabat fungsional PHPI ke Pengelola Kesehatan Ikan dan Teknisi Kesehatan Ikan;
2. Untuk melakukan percepatan penerbitan surat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap usulan yang disampaikan oleh satuan kerja pemerintah daerah, akan dilakukan pertemuan verifikasi, validasi usulan dilakukan bersama dengan Tim Kerja Utilitas Jabatan Fungsional Biro SDM Aparatur dan Organisasi;
3. Akan dilakukan sosialisasi aturan-aturan terbaru terkait dengan pengelolaan jabatan fungsional bidang perikanan budi daya pada kesempatan pertemuan dengan para pejabat fungsional baik melalui diskusi langsung, sosialisasi pembinaan ke satuan kerja pusat, UPT, dan Dinas provinsi/kabupaten/kota.

IK-8. Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB

Pengelolaan SDM Aparatur adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu : (1) proses Mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CANS, pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (2) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan atau sanksi, dan (3) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN.

Indeks pengelolaan SDM Aparatur merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam stantar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 3 (prosen) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 120% (capaian maksimal pada aplikasi kinerja) dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Manajemen SDM dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 99,55% dari anggaran sebesar Rp.3.413.502.000.

Tabel 9. Capaian Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022 - 2023	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	3	6	120	-	3	120

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB									
Indikator Kinerja	Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB									
Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	3	6	120	3	120

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Melakukan layanan mutasi PNS (kenaikan pangkat PNS, perpindahan PNS, peninjauan masa kerja, kenaikan jabatan fungsional untuk jabatan Non KP, dan pemberhentian PNS).
2. Melakukan layanan ketatausahaan (penetapan Karpeg, Karis, Karsu).
3. Melakukan peremajaan data PNS melalui e.pegawai.kkp.go.id atau siasn.bkn.go.id.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

1. Masih terdapat usulan terkait layanan mutasi yang belum lengkap.
2. Masih terdapat PNS yang belum melakukan peremajaan data.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan unit kerja lingkup DJPB terkait dengan usulan layanan mutasi, ketatausahaan dan peremajaan data ASN.

IK-9. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Budidaya

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Budidaya adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (prosen) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Hukum dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 96,04% dari anggaran sebesar Rp.1.255.388.000.

Tabel 10. Capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Budi Daya					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022 - 2023	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
100	100	100	100	-	100	100

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB									
Indikator Kinerja	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Budidaya									
Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
87,50	87,50	108,33	70,00	100	100	100	100	100	100	100

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu menyusun Peraturan/Keputusan mengenai (i) Kampung Perikanan Budidaya dengan hasil Keputusan Menteri Nomor 111 Tahun 2023, (ii), Pelepasan Ikan Nila Nirwana IV dengan hasil Keputusan Menteri Nomor 202 Tahun 2023, (iii) Pelepasan Udang Vanamei Nusa Dewa dengan hasil Keputusan Menteri Nomor 181 Tahun 2023, (iv) Pelepasan Ikan Patin dengan hasil Keputusan Menteri Nomor 180 Tahun 2023, (v) Pelepasan Nila Sakti dengan hasil Keputusan Menteri Nomor 182 Tahun 2023, dan (vi) melakukan pencabutan Permen KP Nomor 05 Tahun 2009 tentang Skala Usaha Pembudidayaan Ikan menjadi Permen Nomor 7 Tahun 2023.

Kendala yang dihadapi yaitu bahan yang didapatkan dari direktorat teknis memakan waktu yang cukup lama.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu menyelesaikan peraturan menteri kelautan dan perikanan tentang obat ikan, Sistem Perbenihan Nasional (CPIB) dan Sertifikasi CBIB.

IK-10. Unit kerja Setditjen Perikanan Budi Daya yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Bitrix24*.

Terdapat 2 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja, diantaranya:

- 1) Dokumen (Bobot 20%): Renstra 2020-2024; Perjanjian Kinerja level 1 dan 2 tahun 2022; Manual IKU level 1 dan level 2; Rencana Kerja RB Tahunan; Rencana Aksi Kinerja atas PK Tahunan level 1 dan 2; Laporan Kinerja level 1 tahun 2021.
- 2) Keaktifan (bobot 80%): Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

Pembobotan yang dimaksud antara lain:

- 1) Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5;
- 2) Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan dengan poin 1;
- 3) Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 92 (prosen) dengan capaian pada tahun sebesar 120% (capaian maksimal pada aplikasi kinerjaku) dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 99,31% dari anggaran sebesar Rp5.930.438.000.

Tabel 11. Capaian Unit kerja Setditjen PB yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Unit kerja Setditjen PB yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022 - 2023	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra

100	92	130	120	3,72	92	120
-----	----	-----	-----	------	----	-----

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB								
Indikator Kinerja		Unit kerja Setditjen PB yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar								
Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
51,58	72,33	92,47	100	100	100	92	130	120	92	120

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Melakukan sosialisasi secara formal dengan mengirimkan memo kepada seluruh eselon II lingkup DJPB.
2. Melaksanakan sosialisasi melalui video tutorial penggunaan platform portal *collaboration office*.
3. Melaksanakan sosialisasi secara informal/mandiri melalui WA, serta berkoordinasi dengan para Ketua Tim Kerja Tata Usaha di setiap unit kerja eselon II lingkup DJPB terkait tata cara penggunaan aplikasi platform portal *collaboration office*.
4. Melakukan koordinasi antar unit kerja pada lingkup DJPB untuk membagikan kegiatan di platform portal *collaboration office*.

Kendala yang dihadapi yaitu: (i) Dikarenakan sosialisasi Pengukuran capaian Manajemen Pengetahuan *Collaboration Office* dilakukan di akhir periode sehingga waktu penilaian sangat terbatas. (ii) Sosialisasi penggunaan platform *Collaboration Office* belum secara maksimal dilakukan (iii) Peserta belum terbiasa dengan platform *Collaboration Office* sehingga perlu waktu penyesuaian (iv) minimal nilai yang didapat adalah 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 sehingga peserta harus memposting narasi kegiatan paling tidak 10 kali.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

- a. Mendorong keaktifan peserta agar memenuhi kepastian unsur 5W1H (What, When, Where, Who, Why dan How) untuk mendapatkan poin 0,5;
- b. Mendorong keaktifan peserta untuk berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1;
- c. Mendorong keaktifan peserta untuk berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.

IK-11. Persentasi Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budidaya

Perjanjian adalah kesepakatan antara Ditjen Perikanan Budidaya dengan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu di bidang perikanan budidaya yang dituangkan secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban serta mengikat para pihak, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 23/PERMEN/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kelautan dan Perikanan.

Prakarsa kerja sama dapat berasal dari internal Ditjen Perikanan Budi Daya maupun dari calon mitra Kerja Sama. Dokumen kerja sama bidang perikanan budi daya merupakan bentuk nota kesepakatan atau perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani antara 2 (dua) pihak atau lebih.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 90 (prosen) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 111,11% dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 99,31% dari anggaran sebesar Rp.5.930.438.000.

Tabel 12. Capaian Persentasi Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Prosentasi Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budidaya					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022 - 2023	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
100	90	100	111,11	11,11	90	111,11

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB									
Indikator Kinerja	Prosentasi Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budidaya									
Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
95	-	89,05	90,26	94,74	100	90	100	111,11	90	111,11

Adapun kegiatan yang dilakukan selama tahun 2023 untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah : (i) melakukan review terhadap draft PKS antara BPBAT Tatelu dengan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan tentang *Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Vokasi*; (ii) review terhadap draft PKS antara BPBAP Takalar dengan Univ.Sembilan Belas November Kolaka tentang *Dukungan Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka*; (iii) mereview draft PKS antara BPBAT Tatelu dengan Univ.Negeri Gorontalo tentang *Dukungan Penyelenggaraan Pengembangan Sumberdaya Bidang Perikanan Budi Daya*; (iv) review draft PKS antara BPBAT Tatelu dengan Politeknik Negeri Nusa Utara tentang *Dukungan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Sektor Perikanan Budi Daya*; (v) melakukan rapat pembahasan antara DJPB dengan

Pemerintah Kab.Wakatobi pada tanggal 10 Juli 2023 tentang *Pengembangan Budi Daya Rumput Laut dalam rangka Modelling Hilirisasi Rumput Laut di Kab.Wakatobi*; (vi) Rapat pembahasan draft PKS antara DJPB dengan Ditjen SDA pada tanggal 12 September 2023 tentang *Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Perikanan Budidaya melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bidang Sumber Daya Air*; (vii) Melakukan rapat lanjutan draft PKS antara DJPB dengan Ditjen SDA pada tanggal 29 November 2023 di Bogor; dan (viii) Rapat kerjasama RI – Korsel untuk membahas Project ODA pada tanggal 29 – 30 Desember 2023.

Untuk kendala yang dihadapi untuk pencapaian indikator ini adalah terkait dengan pembahasan draft dokumen atau proyek kerjasama dengan mitra baik dalam hal negoisasi dan penyusunan draft kerjasama yang membutuhkan waktu yang cukup lama.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya, yaitu melakukan finalisasi terhadap draft dokumen atau proyek yang belum dapat diselesaikan pada triwulan sebelumnya.

IK-12. Presentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya

Berita positif adalah kalimat berita yang di dalamnya tidak dijumpai ada pengingkaran. Penghitungan Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya.

Perhitungan Persentase jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang perikanan budidaya merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif tentang perikanan budidaya yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun online.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 86 (prosen) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 116,28% dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 99,31% dari anggaran sebesar Rp.5.930.438.000.

Tabel 13. Capaian Presentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Presentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022 - 2023	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	86	100	116,28	-	86	116,28

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB								
Indikator Kinerja		Presentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya								
Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	86	100	116,28	86	116,28

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Melakukan klasifikasi pemberitaan sub sektor perikanan budidaya yang bersumber dari Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, serta mengantisipasi kemunculan berita negatif dan persentase berita negatif;
2. Menyebarkan publikasi pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di sektor perikanan budidaya baik secara berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar melalui berbagai media baik online maupun cetak.
3. Melakukan pemantauan secara berkala atas berita-berita yang dipublikasikan oleh media Cetak, Online, Elektronik hingga media sosial;
4. Pembuatan konten kreatif berupa press release, infografis dan video yang disebarluaskan melalui berbagai media sosial DJPB (Instagram, Twitter, Facebook, Youtube);
5. Penyusunan press release hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Budi Daya dan menyebarkan melalui Biro Kerja Sama dan Humas Setjen KP ke berbagai media mainstream cetak maupun online.
6. Menjawab pemberitaan negatif dengan baik dan tepat sasaran;

Kendala yang dihadapi yaitu: (i) tidak seluruh hasil peliputan kegiatan yang dipublikasikan dimuat oleh media cetak maupun online (ii) jumlah publikasi yang terdapat di media mainstream masih sedikit (iii) dukungan data dan informasi dari internal Ditjen Perikanan Budidaya baik dari Unit Kerja eselon II dan UPT sangat terbatas

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu: (i) menjalin kerja sama yang harmonis dan kolaboratif antara sub bagian humas DJPB dengan awak media baik cetak maupun online; (ii) menjaga hubungan dan komunikasi yang baik serta mengoptimalkan sinergo antara sub bagian humas DJPB dengan BHKLN Setjen KKP serta dengan Humas Eselon I lingkup KKP; (iii) melakukan pemantauan secara berkala atas berita-berita yang dipublikasikan oleh media cetak, online, elektronik hingga media sosial; (iv) mengumpulkan pemberitaan harian sub sektor perikanan budi daya serta mengantisipasi kemunculan berita negatif dan persentase berita negatif; dan (iv) Tim Kerja humas mendorong para pejabat fungsional pranata humas seerta seluruh perwakilan unit kerja

eselon II lingkup DJPB selalu proaktif terhadap perkembangan isu-isu seputar sub sektor perikanan budidaya serta produktif dalam menghasilkan press release serta mendistribusikan bahan-bahan publikasi mengenai sub sektor perikanan budidaya

IK-13. Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani

Advokasi hukum adalah pemberian layanan hukum kepada penerima advokasi yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.

Advokasi terdiri dari (1) konsultasi hukum, (2) pendapat hukum, (3) pendampingan hukum, dan (4) penyelesaian permasalahan hukum.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 65 (prosen) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Hukum dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 96,04% dari anggaran sebesar Rp.1.255.388.000.

Tabel 14. Capaian Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022 - 2023	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	65	65	100	-	65	100

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB									
Indikator Kinerja	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani									
Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	65	65	100	65	100

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 yaitu melakukan penyiapan materi pendampingan dan konsultasi hukum terhadap panggilan untuk klarifikasi dari polda metro jaya terkait pengadaan barang dan jasa dibidang perikanan budidaya.

Kendala yang dihadapi yaitu pengumpulan dokumen pengadaan barang dan jasa yang belum didokumentasi secara sistematis.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu melakukan rapat pembahasan penyiapan bahan pemanggilan selanjutnya untuk tim teknis.

IK-14. Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2022

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPB dibandingkan realisasi anggaran TA. 2022 adalah Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPB merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan Keuangan TA. 2022 (audit) tidak melebihi 1%.

Temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan, baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Pengertian ketidaksesuaian sendiri adalah penyimpangan melalui bukti obyektif atas kriteria audit yang ditetapkan auditor harus menginvestigasi untuk menentukan secara tepat kriteria audit yang dilanggar dan menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (prosen) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Manajemen Keuangan dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp.4.124.426.000.

Tabel 15. Capaian Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2022

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2022					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022 - 2023	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
100	100	100	100	-	100	100

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB
Indikator Kinerja	Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2022

Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu membuat tanggapan atas hasil pemeriksaan BPK dan melakukan Sistem Pengendalian Internal (SPI) antara lain:

1. Penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2022 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya;
2. Penyelesaian saldo utang kepada pihak ketiga;
3. Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi oleh masing-masing satker lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya serta pencatatan persediaan dalam aplikasi.
4. Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan probity audit dan rewiuw atas pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan hingga pembayaran.
5. Memperbaiki rencana umum pengadaan, melakukan perencanaan kegiatan dengan matang, serta meningkatkan kompetensi penanggung jawab kegiatan dalam rangka pemeriksaan fisik hasil pekerjaan.

Kendala yang dihadapi yaitu sering ditemukannya kurang volume dalam pelaksanaan pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi barang antara kontrak dan barang yang diadakan sehingga menimbulkan potensi kerugian negara.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan probity audit dan rewiuw atas pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan hingga pembayaran.

IK-15. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen PB

Tingkat kepatuhan merupakan pengukuran pelaksanaan suatu kegiatan, yang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Perhitungan tingkat kepatuhan bisa dikontrol bila suatu pelaksanaan program telah sesuai dengan standart.

Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen PB merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 77,5 (prosen) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 106,9% dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar

pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan BMN dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 99,99% dari anggaran sebesar Rp.724.900.000.

Tabel 16. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen PB

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB								
Indikator Kinerja		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen PB								
		Realisasi 2017-2022				2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	73,5	76,91	77,5	82,85	106,90	77,5	106,90
Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB								
Indikator Kinerja		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen PB								
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022 - 2023	Renstra DJPB 2020-2024					
Realisasi	Target	Realisasi			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra				
76,91	77,5	82,85	106,9	4,35	77,5	106,9				

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu melaksanakan pemantauan proses dan realisasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi SIRUP. Pemantauan tersebut dimulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan tahap pelaksanaan PBJ serta dipastikan berjalan sesuai ketentuan.

Kendala yang dihadapi yaitu masih kurang ketaatan satker dalam melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa pada tahun berjalan.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu melakukan peningkatan pada beberapa aspek diantaranya yakni:

1. Ketaatan dalam penyediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan;
2. Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap kegiatan pengadaan Barang/Jasa.

IK-16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB

Tingkat kepatuhan merupakan pengukuran pelaksanaan suatu kegiatan, yang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Perhitungan tingkat kepatuhan bisa dikontrol bila suatu pelaksanaan program telah sesuai dengan standart.

Dalam pasal 1 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lain yang sah.

Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun metode perhitungannya dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Pemanfaatan BMN;
2. Pengamanan BMN dengan membuat Berita acara Peminjaman/ BA Pemakaian kepada masing-masing pegawai yang menggunakan BMN;
3. Mengusulkan Penghapusan atas BMN yang rusak berat kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penjualan atau pemusnahan;
4. Menyusun Rencana kebutuhan BMN lingkup satker secretariat;
5. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
6. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
7. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu, akuntabel dan efisien;
8. Melakukan Verifikasi atas usulan BAST 526xxx pada satker pusat yang akan ditandatangani oleh KPB satker Pusat;
9. Melakukan monitoring dan pembinaan Laporan BMN di kepada seluruh anak satker Sekretariat DJPB (Dit. KKI, Dit. Produksi dan Usaha, Dit. Pakan dan Obat Ikan, Dit. Perbenihan);
10. Melakukan Stock opname fisik atas persediaan yang berada di Gudang penyimpanan;
11. Melakukan Pencatatan, monitoring dan mendistribusikan persediaan dan hasil Pengadaan alat pengolah data kepada pegawai Satker Sekretariat DJPB; dan
12. Membuat SOP terkait pengelolaan BMN.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 77,5 (prosen) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 120% (capaian maksimal pada aplikasi kinerjaku) dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indicator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan BMN dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 99,99% dari anggaran sebesar Rp.724.900.000.

Tabel 17. Capaian Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022 - 2023	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
76,06	77,5	93	120	18,59	77,5	120

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB									
Indikator Kinerja	Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB									
Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
					76,06	77,5	93	120	77,5	120

Adapun permasalahan yang harus muncul dan harus diselesaikan sebagai berikut:

1. Masih terdapat BMN henti guna dan rusak berat yang masih tercatat di dalam laporan BMN;
2. Masih terdapat belanja barang persediaan yang salah akun sehingga tidak membentuk neraca persediaan atas realisasi pengadaan persediaan tersebut;
3. Mengusulkan penetapan status penggunaan (PSP) kepada pengguna Barang atau Pengelola Barang;
4. Terdapat BMN berupa kendaraan roda 2 yang masih harus dihapuskan atau diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang dimana kendaraan tersebut terletak dilokasi tersebut;
5. Masih diperlukan pengamanan asset berupa terutama alat pengolah data, Tanah dan kendaraan yang sangat rentan dikuasi oleh pihak lain;
6. Tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Jenderal atas Pengelolaan BMN dan penatausahaan BMN atas pemeriksaan Laporan BMN; dan
7. Melakukan inventarisasi terhadap aset yang belum diketemukan.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah melakukan peningkatan pada beberapa aspek diantaranya yakni:

1. Melakukan pengamanan BMN dari aspek administrasi, pencatatan, dan hukum;
2. Memanfaatkan Laporan RKBMN dalam penyusunan RKA-K/L tahun berikutnya;
3. Mendorong usulan penetapan status penggunaan (PSP) BMN satker Sekretariat untuk ditetapkan PSP nya oleh Kementerian Keuangan;
4. Mendorong percepatan penghapusan BMN rusak berat pada satker Sekretariat DJPB;

5. Melakukan inventarisasi atas BMN yang akan dilakukan pengelolaannya seperti penghapusan, PSP, Pemanfaatan, Hibah yang usulannya ditujukan kepada Pengguna Barang atau Pengelola Barang;
6. Melakukan penyusunan dan penyampaian laporan BMN secara tepat waktu;
7. Melakukan update data aplikasi Siman terhadap PSP yang sudah terbit SK;
8. Melakukan revisi RKBMN pada tahun anggaran berjalan lingkup Sekretariat; dan
9. Menyelesaikan tindak lanjut temuan LHP terhadap BMN lingkup Sekretariat DJPB.

IK-17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PB

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan.

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PB adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon I lingkup KKP.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 77,5 (prosen) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 115,03% dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Manajemen Keuangan dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp.4.124.426.000.

Tabel 18. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PB

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PB					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022 - 2023	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
89,96	77,5	89,15	115,03	-4,97	77,5	115,03

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB		
Indikator Kinerja	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PB		
	Realisasi 2017-2022	2023	Renstra 2020-2024

2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	74,32	70,41	67,21	89,86	77,5	89,15	115,03	77,5	115,03

Untuk mendukung pencapaian Indikator ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 yaitu:

1. Koordinasi rutin dengan unit kerja terkait melalui media sosial (*WhatsApp Group*) dan media cetak (surat resmi), dan
2. Koordinasi dengan Itjen. KKP untuk konfirmasi BA PTL.

Kendala yang dihadapi yaitu keterlambatan penyampaian laporan tindak lanjut. Rekomendasi yang terbit dan tindak lanjut yang cepat dan tepat merupakan bentuk pengendalian yang diimplementasikan dengan tepat demi kinerja pengawasan Perikanan Budidaya yang lebih baik.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu meningkatkan koordinasi dengan satker terkait terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

IK-18. Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 75 (prosen) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 120% (capaian maksimal pada aplikasi kinerja) dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Umum dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 99,48% dari anggaran sebesar Rp.4.717.500.000.

Tabel 19. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB
Indikator Kinerja	Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya

2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022 - 2023	Renstra DJPB 2020-2024	
	Realisasi	Target			Realisasi	Target 2024
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
92,37	75	98,32	120	-	75	120

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB								
Indikator Kinerja		Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya								
Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	84,71	92,37	75	98,32	120	75	120

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu :

1. Koordinasi di lingkup Sesditjen PB dalam hal pemenuhan data dukung dan melakukan pengawasan kearsipan secara rutin;
2. Telah dilakukan Penilaian Pengawasan Kearsipan sebagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan

DAFTAR HASIL VERIFIKASI PENILAIAN INSTRUMEN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL PADA UNIT PENGOLAH KANTOR PUSAT LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TAHUN 2023

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI A SPEK PAD (x 50%)	NILAI A SPEK SDK(x 50%)	NILAI A SPEK PAD+SDK(100 %)	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP KANTOR PUSAT ESELON 1
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	49,24	49,08	98,32	AA (SANGAT MEMUASKAN)	3	1
2	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	42,59	33,39	75,98	BB (SANGAT BAIK)	34	5
3	Direktorat Perbenihan	43,82	46,17	89,98	A (MEMUASKAN)	19	2
4	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	48,78	32,83	79,59	BB (SANGAT BAIK)	31	4
5	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	47,37	32,83	80,21	A (MEMUASKAN)	29	3

DAFTAR HASIL VERIFIKASI PENILAIAN INSTRUMEN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL PADA UNIT PENGOLAH UNIT PENGELOLA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TAHUN 2023

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI A SPEK PAD (x 50%)	NILAI A SPEK SDK(x 50%)	NILAI A SPEK PAD+SDK(100 %)	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP UPT DJPB
1	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	40,11	46,41	86,51	A (MEMUASKAN)	34	5
2	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	39,49	49,5	88,99	A (MEMUASKAN)	24	2
3	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	39,67	47,83	87,5	A (MEMUASKAN)	28	3
4	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Sibubondo	49,82	34,5	84,32	A (MEMUASKAN)	46	7
5	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	37,27	42,83	80,11	A (MEMUASKAN)	75	10
6	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi	36,03	47,83	83,87	A (MEMUASKAN)	53	8
7	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	35,65	32,83	68,48	B (BAIK)	122	14
8	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	43,76	42,83	86,59	A (MEMUASKAN)	33	4
9	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	39,75	34,5	74,25	BB (SANGAT BAIK)	100	11
10	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	38,36	46,67	85,03	A (MEMUASKAN)	41	6
11	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batsee	37,59	31,17	68,75	B (BAIK)	120	13
12	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Taleu	34,96	31,17	66,12	B (BAIK)	132	15
13	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karangarang	40,17	32,78	72,94	BB (SANGAT BAIK)	108	12
14	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem	49,82	33,67	83,49	A (MEMUASKAN)	56	9
15	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	46,54	47,83	94,37	AA (SANGAT MEMUASKAN)	7	1

Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 pada Unit Pengolah Lingkup Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB KKP untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mendapatkan nilai Aspek PAD dan SDK sebesar 98,32% dengan kategori sangat memuaskan (AA) dan menduduki peringkat ketiga Tingkat KKP serta menduduki peringkat pertama di Lingkup Kantor Pusat Eselon I.

Gambar 10. Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 pada Unit Pengolah Lingkup Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB KKP

Kendala yang dihadapi yaitu masih terdapat beberapa kearsipan yang belum memenuhi standar pengawasan kearsipan.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu berkoordinasi untuk perbaikan dan melakukan pengawasan secara rutin untuk kearsipan di lingkungan Setditjen Perikanan Budi Daya.

IK-19. Persentase layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya

Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan-layanan lainnya.

Selain pelayanan internal dalam kegiatan Layanan Perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 75 (prosen) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 120% (capaian maksimal pada aplikasi kinerja) dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Umum dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 99,48% dari anggaran sebesar Rp.4.717.500.000.

Tabel 20. Capaian Persentase layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Persentase layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022 - 2023	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
100	75	100	120	-	75	120

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB
Indikator Kinerja	Persentase layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya

Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	100	75	100	120	75	120

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu melaksanakan kegiatan rutin untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari perkantoran, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta pelaksanaan tugas Pimpinan.

Kendala yang dihadapi yaitu: ketaatan dan kerapian data dukung untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dalam hal ketaatan dan kerapian data dukung untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

IK-20. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya

Target Capaian IKPA tahun 2023 yang semula 89 berubah menjadi 93,75. Hal ini terjadi dikarenakan KKP sedang memperjuangkan peningkatan pendapatan pegawai melalui kenaikan tunjangan kinerja.

Penilaian IKPA berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat ketentuan umum bahwa penilaian IKPA terdiri dari 3 parameter yaitu

1. Kualitas implementasi perencanaan anggaran, dimana terdapat 2 penilaian parameter yaitu revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.
2. Kualitas pelaksanaan anggaran, dimana terdapat 5 penilaian parameter yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM.
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran terdapat 1 penilaian parameter yaitu Capaian Output.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 93,75 (nilai) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 92,27% dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Manajemen Keuangan dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp.4.124.426.000.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB
Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya

2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022 - 2023	Renstra DJPB 2020-2024	
	Realisasi	Target			Realisasi	Target 2024
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
91,51	93,75	86,5	92,27	-10,55	93,75	92,27

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB								
Indikator Kinerja		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya								
Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	95,11	89,07	91,51	93,75	86,50	92,27	93,75	92,27

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Mempedomani Perdirjen Perbendaharaan Nomor. PER-40/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir TA.2020;
2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan prioritas/reguler, penyerapan anggaran, dan capaian kinerjanya (keluaran); dan
3. Melakukan identifikasi kebutuhan belanja gaji dan tunjangan lainnya guna menghindari adanya pagu minus pada akhir tahun anggaran.

Permasalahan yang muncul pada capaian IKPA tahun 2023 , yaitu:

1. Tertundanya pelaksanaan sejumlah kegiatan yang harusnya sudah dapat direalisasikan sebagai akibat dari adanya Automatic Adjustment; dan
2. Terdapat dua parameter yang tidak sinkron yaitu (i) Kualitas implementasi perencanaan anggaran pada poin Deviasi halaman III DIPA dan (ii) Kualitas pelaksanaan anggaran pada poin penyerapan anggaran dikarenakan terdapat deviasi yang sangat besar dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan November, penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PB terjadi peningkatan yang sangat tinggi pada Bulan Desember sehingga dua parameter tersebut tidak dapat memenuhi nilai yang diharapkan.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Apabila terjadi pagu minus, segera melakukan revisi DIPA dengan berpedoman pada Permen Keuangan;
2. Apabila dalam proses pembayaran terdapat kendala, agar melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN;

3. Memastikan seluruh administrasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran belanja telah sesuai ketentuan dalam rangka penyajian laporan keuangan Setditjen Perikanan Budi Daya; dan
4. Memasukkan angka pada halaman III DIPA sesuai dengan KAK dan RAB Kegiatan yang disusun oleh satker.

IK-21. Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 86 (nilai) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 92,47% dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 97,80% dari anggaran sebesar Rp4.033.006.000.

Tabel 22. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022 - 2023	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
81,9	86	79,52	92,47	-2,76	86	92,47

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB		
Indikator Kinerja	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya		
	Realisasi 2017-2022	2023	Renstra 2020-2024

2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	98,08	71,49	-	95,23	86	79,52	92,47	86	92,47

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Mempedomani Perdirjen Perbendaharaan Nomor. PER-40/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir TA.2020;
2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan prioritas/reguler, penyerapan anggaran, dan capaian kerjanya (keluaran); dan
3. Melakukan identifikasi kebutuhan belanja gaji dan tunjangan lainnya guna menghindari adanya pagu minus pada akhir tahun anggaran.

Kendala yang dihadapi yaitu: tertundanya pelaksanaan sejumlah kegiatan yang harusnya sudah dapat direalisasikan sebagai akibat dari adanya Automatic Adjustment.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Apabila terjadi pagu minus, segera melakukan revisi DIPA dengan berpedoman pada Permen Keuangan;
2. Apabila dalam proses pembayaran terdapat kendala, agar melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN; dan
3. Memastikan seluruh administrasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran belanja telah sesuai ketentuan dalam rangka penyajian laporan keuangan Setditjen Perikanan Budi Daya.

IK-22. Persentase Capaian Nilai PMPRB DJPB Area Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Dan Penguatan Pengawasan

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (i) kelembagaan atau organisasi; (ii) ketatalaksanaan atau *business process*; dan (iii) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja Sekretariat Jendral. PMRB di Unit Setjen dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Kepala Biro SDMA, melibatkan Kepala Biro/Pusat penanggung jawab area RB, sesuai Kepmen KP No. 56 Tahun 2020 tentang Tim RB Setjen.

Nilai PMPRB Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penilaian dilakukan oleh

Tim RB Unit Esleon I dan dievaluasi oleh Inspektorat Mitra. Nilai capaian merupakan hasil evaluasi implementasi RB di unit eselon I, pada komponen pengungkit (Pemenuhan dan Reform). Model PMPRB yang digunakan, disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 94 (prosen) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 109,7% dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indicator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 99,48% dari anggaran sebesar Rp.814.150.000.

Tabel 23. Capaian Persentase Capaian Nilai PMPRB DJPB Area Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Dan Penguatan Pengawasan

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Persentase Capaian Nilai PMPRB DJPB Area Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Dan Penguatan Pengawasan					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022 - 2023	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
34,03	94	103,12	109,7	5,88	94	109,7

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB									
Indikator Kinerja	Persentase Capaian Nilai PMPRB DJPB Area Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Dan Penguatan Pengawasan									
Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
89,24	84,29	97,40	31,55	32,51	34,03	94	103,12	109	94	109,7

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu:

1. Menyampaikan Usulan Form Identifikasi terhadap Inovasi Digitalisasi yang telah dilaksanakan di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang dapat memberikan hasil/dampak kepada masyarakat melalui tautan <https://heylink.me/praktikbaikrbkbp/> pada tanggal 30 Maret 2023.
2. Mengikuti Penyusunan Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan 2020 – 2024 pada tanggal 17 – 18 April 2023 secara daring. Hasil rapat sebagai berikut:
 - a. Untuk PIC Kegiatan Utama yang telah ditunjuk agar dapat mengisi target capaian pada rancangan *roadmap* RB sampai dengan tahun 2024, dan menyiapkan rencana aksinya.
 - b. Reformasi Birokrasi tematik telah disepakati untuk berfokus pada tema pengentasan kemiskinan yang merupakan mandate dari inpres nomor 4 tahun 2022. Diharapkan masing – masing unit kerja eselon I yang dimandatkan dapat menyiapkan rencana aksinya serta target penyelesaiannya.

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/ STAKEHOLDER UTAMA)	JUMLAH ANGGARAN (dlm Rupiah)	UNITSATUAN KERJA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV				
Tingginya jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang tergolong keluarga keluarga miskin ekstrem	Memberdayakan Pembudi daya ikan yang tergolong keluarga miskin ekstrem	Nilai Tukar Pembudi daya	104	Penyukuran Sarana perbenihan ikan	Sarana paket	Jumlah sarana perbenihan ikan yang disalurkan					293	Langsung	58.563.340.000	Ditjen PB
				Pengelolaan ligasi Tambak Partisipatif (PITAP)	paket	Jumlah ligasi Tambak Partisipatif (PITAP)					55	Langsung	16.500.000.000	Ditjen PB
				Penyukuran Sarana produksi usaha	paket	Jumlah Sarana produksi usaha yang disalurkan					1326	Langsung	71.332.500.000	Ditjen PB
				Penyukuran Peralatan/sarana pakan dan obat ikan	unit	Jumlah Peralatan/sarana pakan dan obat ikan yang disalurkan					28	Langsung	4.719.960.000	Ditjen PB
				Penyukuran Calon induk unggul ikan air tawar	Ekor	Jumlah Calon induk unggul ikan air tawar yang disalurkan	840	32.761	5.418	15.175		Langsung	1.960.110.000	Ditjen PB
				Penyukuran Calon induk unggul ikan air payau	Ekor	Jumlah Calon induk unggul ikan air payau yang disalurkan	4.000	5.209	177	6.729		Langsung	978.329.000	Ditjen PB
				Penyukuran Benih ikan air tawar	Ekor	Jumlah Benih ikan air tawar yang disalurkan	6.364.500	3.034.438	4.610.561	7.051.445		Langsung	6.855.186.000	Ditjen PB
				Penyukuran Benih ikan air payau	Ekor	Jumlah Benih ikan air payau yang disalurkan	32.922.000	16.880.483	15.727.101	21.843.195		Langsung	4.897.755.000	Ditjen PB
				Penyukuran Benih ikan air laut	Ekor	Jumlah Benih ikan air laut yang disalurkan	746.500	1.444.336	486.865	1.379.453		Langsung	15.664.936.000	Ditjen PB

Gambar 11. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi DJPB Tahun 2023 dengan Tema Pengentasan Kemiskinan

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu pada selanjutnya yaitu akan berkordinasi dengan Setjen KKP untuk kegiatan di eselon I dalam rangka supporting pelaksanaan RB General dan RB Tematik KKP tahun 2024.

IK-23. Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Zona Integritas (ZI) merupakan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja yang bertujuan membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP merupakan Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, yakni:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 (survei 3,60) Nilai Sub Komponen "kinerja lebih baik" minimal 2,50;
4. Memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 14,00 (survei 3,20).

Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator kegiatan ini adalah 76 (prosen) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 105,17% dari target yang ditetapkan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola

Internal dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 99,48% dari anggaran sebesar Rp.814.150.000.

Tabel 24. Capaian Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB					
Indikator Kinerja	Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP					
2022	2023		% Capaian	% Pertumbuhan 2022 - 2023	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	terhadap target Tahun 2023	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
11	76	79,93	105,17	-14,83	76	105,17

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat DJPB									
Indikator Kinerja	Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP									
Realisasi 2017-2022						2023			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	5	-	8	11	76	79,93	105,17	76	105,17

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 yaitu:

- a. Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BLUPPB Karawang pada tanggal 13 – 17 Februari 2023;
- b. Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BPBAP Takalar pada tanggal 14 – 17 Februari 2023;
- c. Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BPBAT Tatelu tanggal 21 – 24 Februari 2023;
- d. Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BPBAP Ujung Batee tanggal 8 – 11 Maret 2023;
- e. Asistensi dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BPBAT Jambi tanggal 14 – 17 Maret 2023;

- f. Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BLUPPB Karawang tanggal 19 – 21 Maret 2023;
- g. Asistensi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BPBL Batam tanggal 29 Maret – 1 April 2023;
- h. Pembinaan dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BPBAP Situbondo pada tanggal 12 – 15 April 2023;
- i. Pembinaan dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BLUPPB Karawang tanggal 23 – 26 Mei 2023;
- j. Pembinaan dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BPBAP Ujung Batee tanggal 5 – 8 Juni 2023;
- k. Pembinaan dan Pendampingan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BPBAP Takalar tanggal 20 – 23 Juni 2023;
- l. Pembinaan dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BPBAT Tatelu pada tanggal 4 – 7 Juli 2023;
- m. Pembinaan dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BPKIL Serang pada tanggal 1 – 5 Agustus 2023;
- n. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BPBAP Ujung Batee pada tanggal 11-13 Oktober 2023;
- o. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BBPBAP Jepara pada tanggal 25-28 Oktober 2023;
- p. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BPBAT Mandiingin pada tanggal 22-24 November 2023;
- q. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BPIUUK Karangasem pada tanggal 22-24 November 2023;
- r. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BBPBAP Jepara pada tanggal 12-15 Desember 2023;

- s. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BBPBAT Sukabumi pada tanggal 19-21 Desember 2023;
- t. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BLUPPB Karawang pada tanggal 22 Desember 2023.

Kendala yang dihadapi yaitu:

1. Unit kerja untuk dinilai TPI KKP belum secara berkelanjutan mengupdate dokumen pelaksanaan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM;
2. Unit kerja untuk dinilai TPI KKP belum menindaklanjuti hasil temuan BPK/Itjen KKP

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Tim Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di UPT lingkup DJPB yang akan dinilai oleh TPI untuk mengupdate dokumen/data dukung pelaksanaan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM;
2. Berkoordinasi dengan unit kerja UPT DJPB yang akan dinilai oleh TPI untuk segera menindaklanjuti hasil temuan

3.3. Akuntabilitas Keuangan

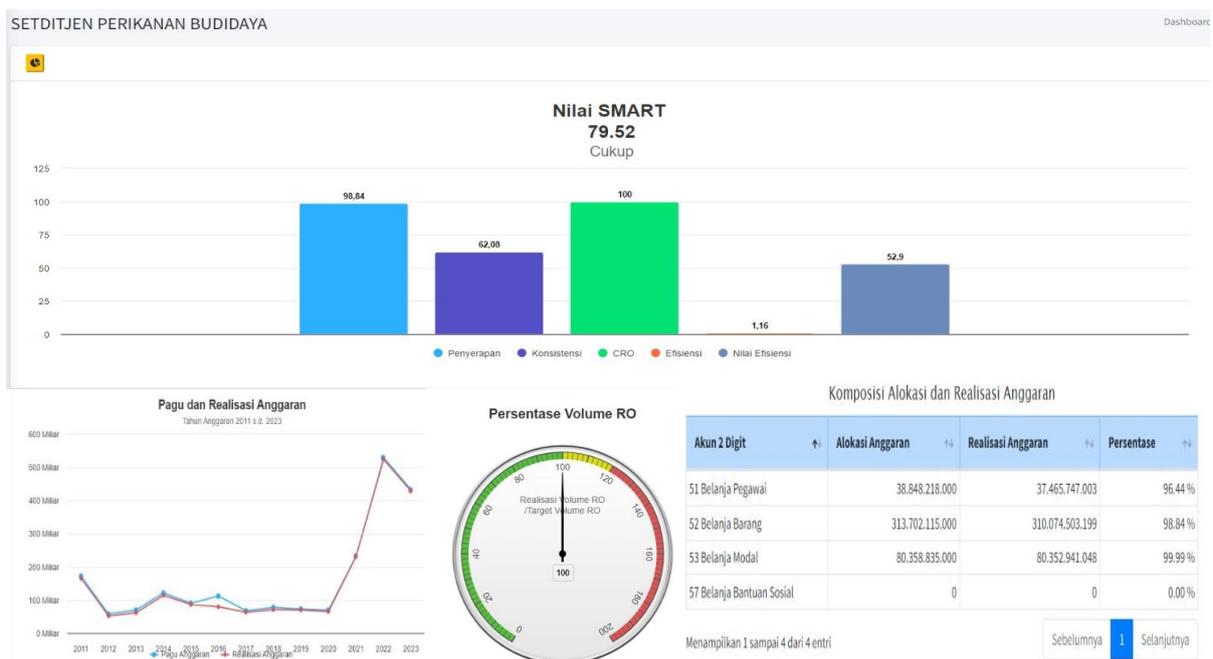
Alokasi anggaran APBN dilingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2023 adalah sebesar Rp.432.909.168.000 dan telah terealisasi Rp.427.893.191.250 atau sebesar 98,84% (sumber data aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan prosentase realisasi serapan belanja dengan sebesar 0,12 persen dari capaian tahun 2022 sebesar 98,96%.

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL	
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER	A	V	
			A	V	A	V	A	V	A	V	A	V	A	V
1	632462 SETDITJEN PERIKANAN BUDI DAYA	PAGU	38.848.218,000	313.702.115,000	80.358.835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	432.909.168,000
		REALISASI	37.465.747,003 (96,44%)	310.074.503,199 (98,84%)	80.352.941,048 (99,99%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	427.893.191,250 (98,84%)
		SISA	1.382.470,997	3.627.611,801	5.893,952	0	0	0	0	0	0	0	0	5.015.976,750
GRAND TOTAL		PAGU	38.848.218,000	313.702.115,000	80.358.835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	432.909.168,000
		REALISASI	37.465.747,003 (96,44%)	310.074.503,199 (98,84%)	80.352.941,048 (99,99%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	427.893.191,250 (98,84%)
		SISA	1.382.470,997	3.627.611,801	5.893,952	0	0	0	0	0	0	0	0	5.015.976,750

Gambar 12. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	
1	632462 SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	PAGU	40,342,548,000	303,956,523,000	185,215,849,000	0	0	0	0	0	0	0	529,514,920,000
		REALISASI	39,965,225,571 (99.06%)	298,864,654,629 (98.32%)	185,155,100,453 (99.97%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	523,984,980,653 (98.96%)
		SISA	377,322,429	5,091,868,371	60,748,547	0	0	0	0	0	0	0	5,529,939,347
GRAND TOTAL		PAGU	40,342,548,000	303,956,523,000	185,215,849,000	0	0	0	0	0	0	0	529,514,920,000
		REALISASI	39,965,225,571 (99.06%)	298,864,654,629 (98.32%)	185,155,100,453 (99.97%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	523,984,980,653 (98.96%)
		SISA	377,322,429	5,091,868,371	60,748,547	0	0	0	0	0	0	0	5,529,939,347

Gambar 13. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2022



Gambar 14. Nilai Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen PK Sesditjen Perikanan Budi Daya tahun 2023 bahwa Sesditjen Perikanan Budi Daya telah melaksanakan tugas, fungsi dan misinya berdasarkan uraian pencapaian kinerja dalam BAB III. Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2023, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa:

1. Alokasi anggaran untuk Setditjen Perikanan Budi Daya telah terealisasi sebesar Rp.427.893.191.250 atau sebesar 98,84% (sumber data aplikasi OM-SPAN Kementerian

Keuangan). Hal tersebut diakibatkan adanya beberapa pengembalian atas sisa kontrak terhadap beberapa kegiatan.

2. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Setditjen Perikanan Budi Daya cukup baik yakni sebesar 107,7 (Nilai) (sumber data Aplikasi Kinerja KKP).

Beberapa rekomendasi atas ketercapaian target yang ditetapkan maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya adalah sebagaimana berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	PM SAKIP Sekretariat DJPB	<ul style="list-style-type: none"> - memperbaiki penyediaan dokumen perencanaan kinerja yang SMART, memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>), serta memanfaatkan secara berkesinambungan; - mendorong peningkatan kualitas SDM yang melaksanakan dan mengimplementasikan SAKIP di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya.
2	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan pembinaan disiplin SDM Aparatur; - monitoring disiplin pegawai; dan - monitoring penginputan dan capaian realisasi SKP sesuai matrik peran hasil yang mengacu pada indikator kinerja Sesditjen Perikanan Budi Daya.
3	Pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong satker untuk melakukan (i) Ketaatan dalam penyediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dan (ii) Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap kegiatan pengadaan Barang/Jasa.
4	Ketaatan Satker dalam pengelolaan BMN	<p>Mendorong satker untuk (i) memanfaatkan RKBMN dalam penyusunan RKA-K/L tahun berikutnya, (ii) mendorong usulan penetapan status penggunaan (PSP) BMN satker untuk ditetapkan PSP nya oleh Kementerian Keuangan, (iii) melakukan inventarisasi atas BMN yang akan dilakukan pengelolaannya seperti penghapusan, PSP, Pemanfaatan, Hibah yang usulannya ditujukan kepada Pengguna Barang atau Pengelola Barang, (iv) percepatan penghapusan BMN rusak berat pada satker Sekretariat DJPB, (v) penyusunan dan penyampaian laporan BMN secara tepat waktu, (vi) dan menyelesaikan tindak lanjut temuan LHP terhadap BMN lingkup Sekretariat DJPB.</p>

LAMPIRAN

Lampiran I : 1-4

Hal : Perjanjian Kinerja Awal



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gemi Triastutik**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya

Gemi Triastutik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Sekretanat Ditjen Perikanan Budidaya	1. Indeks Perencanaan bidang Perikanan Budidaya (Indeks)	8
	2. Nilai Rekonsiliasi kinerja Setditjen PB (%)	93
	3. Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang terintegrasi KUSUKA (%)	80
	4. Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi (%)	80
	5. Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) lahan pembudidayaan ikan yang terintegrasi (%)	100
	6. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB (Indeks)	81
	7. Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya (%)	71
	8. Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB (%)	3
	9. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya (%)	100
	10. Unit kerja Setditjen PB yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
	11. Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti di bidang Perikanan Budidaya (%)	90
	12. Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya (%)	≥86
	13. Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya yang Ditangani (%)	65
	14. Batas tertinggi Prosentase nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat jenderal perikanan budidaya dibandingkan realisasi anggaran Direktorat jenderal perikanan budidaya Tahun 2022 (%)	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Direktorat jenderal perikanan budidaya Tahun 2022 (%)	
	15. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen PB (%)	77,5
	16. Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB (%)	77,5
	17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PB (%)	77,5
	18. Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen PB (%)	75
	19. Persentase layanan perkantoran Setditjen PB (%)	75
	20. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen PB (Nilai)	89
	21. Nilai Kinerja Anggaran Setditjen PB (Nilai)	82
	22. Persentase Capaian Nilai Pmprb Djpb Area Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sdm, Penguatan Akuntabilitas, Dan Penguatan Pengawasan (%)	94
	23. Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Oleh Tim Penilai Internal KKP (Nilai)	76

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	98.584.812.000
	Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2023	98.584.812.000

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya



Gemi Triastutik

Lampiran II : 1-5

Hal : Perjanjian Kinerja Revisi I



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gemi Triastutik**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan
Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Gemi Triastutik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1.	Indeks Perencanaan Bidang Perikanan Budi Daya (Indeks)	8
		2.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Setditjen PB (Persen)	93
		3.	Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang terintegrasi KUSUKA (Persen)	80
		4.	Persentase Data Produksi Perikanan Budi Daya yang Tervalidasi (Persen)	80
		5.	Persentase Data Realisasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) lahan Pembudidayaan Ikan yang terintegrasi (Persen)	100
		6.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budidaya (Indeks)	81
		7.	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	71
		8.	Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB (Persen)	3
		9.	Persentase Capaian Nilai PMPRB DJPB Area Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, dan Penguatan Pengawasan (Persen)	94
		10.	Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP (Nilai)	76

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	11. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	100
	12. Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani (Persen)	65
	13. Unit Kerja Setditjen PB yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Persen)	92
	14. Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	90
	15. Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya (Persen)	≥85
	16. Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Jenderal perikanan Budi Daya dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2022 (Persen)	100
	17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	77,5
	18. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	89
	19. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	77,5
	20. Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	82

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	77.5
	22. Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	75
	23. Persentase layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	75

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya



Gemi Triastutik

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	98.390.816.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023		98.390.816.000

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya



Gemi Triastutik

Lampiran III : 1-5

Hal : Perjanjian Kinerja Revisi II



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditijspb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gemi Triastutik**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan
Budi Daya


Tb. Haeru Rahayu


Gemi Triastutik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1.	Indeks Perencanaan Bidang Perikanan Budi Daya (Indeks)	8
		2.	Nilai PM SAKIP Setditjen PB (Persen)	75
		3.	Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang terintegrasi KUSUKA (Persen)	80
		4.	Persentase Data Produksi Perikanan Budi Daya yang Tervalidasi (Persen)	80
		5.	Persentase Data Realisasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) lahan Pembudidayaan Ikan yang terintegrasi (Persen)	100
		6.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budidaya (Indeks)	81
		7.	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	71
		8.	Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB (Persen)	3
		9.	Persentase Capaian Nilai PMPRB DJPB Area Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, dan Penguatan Pengawasan (Persen)	94
		10.	Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP (Nilai)	76

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	100
		12. Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani (Persen)	65
		13. Unit Kerja Setditjen PB yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Persen)	92
		14. Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	90
		15. Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya (Persen)	≥86
		16. Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Jenderal perikanan Budi Daya dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2022 (Persen)	100
		17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	77,5
		18. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	89
		19. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	77,5
		20. Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	82

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	77,5
		22. Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	75
		23. Persentase layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	75

Jakarta, 06 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan
Budi Daya



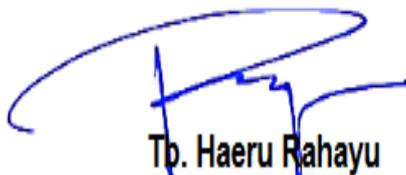
Gemi Triastutik

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	98.390.816.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023		98.390.816.000

Jakarta, 06 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan
Budi Daya



Gemi Triastutik



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041**